

BAB V

PEMBAHASAN DAN DISKUSI PENELITIAN

5.1. Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama sebagai *political actor*

Pembahasan yang akan dianalisis peneliti yaitu berdasarkan data temuan penelitian terkait Retorika politik Basuki Tjahaja Purnama. Retorika politik bisa dipahami sebagai salah satu strategi persuasi untuk meyakinkan orang lain. Dalam konteks komunikasi politik, banyak orang yang menyamakan retorika dengan propaganda. Zamawi dan Johnston membedakan keduanya secara gamblang:

A Useful distinction to make at this point is between the persuasion of rhetoric, which seeks to find compelling arguments to convince people, and the coercion of propaganda, which insist people believe certain thing or act in certain way by using communication techniques to end discussion (Johnston dan Zawawi,2000,h.282)

Retorika mengedepankan argumentasi-argumentasi sedangkan propaganda lebih mirip paksaan, tak memberikan ruang bagi publik untuk berpikir dan berwacana. Finnemore mengatakan (Jackson & Krebs,2007,h.6) mekanismenya *political actor* berusaha mengembangkan pemahaman bersama dan dapat dikatakan sebagai persuasi untuk mencapai “klaim normatif.” Sasarannya untuk menginternalisasi keyakinan baru dan akibatnya mengadopsi identitas dan referensi baru. Tindakan *agent* menjadi struktur sosial, gagasan menjadi norma, dan subjektif menjadi intersubjektif.

Nimmo (2011,h.30) mengatakan perlunya para komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka di dalam masyarakat harus ditetapkan, yaitu Politisi (wakil dan ideolog), komunikator profesional (promotor dan jurnalis) dan aktivis (juru bicara dan pemuka pendapat). Dalam penelitian ini klasifikasi Basuki Tjahaja Purnama termasuk dalam komunikator politik kategori politisi ideolog karena ia merupakan produk dari proses

kaderisasi, meniti karir politik dimulai menjadi ketua Dewan Perwakilan Cabang PPIB (Partai Perhimpunan Indonesia Baru) Kabupaten Belitung Timur.

Hasil analisis data yang telah dikemukakan pada Bab IV sebelumnya dihubungkan dengan konsep-konsep yang dikemukakan pada Bab II merupakan dasar untuk pembahasan sesuai dengan tujuan akhir penelitian yang berjudul **“Studi Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* Tokoh Basuki Tjahaja Purnama Dalam Perspektif Dramatisme”**.

Tabel 5.1 Hasil Temuan Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

NO	Dasar Teori	Implikasi Penelitian	Hasil Temuan
1.	Atwater (2007) <i>Senator Barack Obama The Rhetoric of Hope and The American Dream</i>	Pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkapkan retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak sehingga menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat.	Kekhasan retorika Ahok terletak pada penggunaan bahasanya sebagai <i>style</i> yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan <i>powerful</i> . Contohnya penggunaan metafora, “rampok”, “maling”, “begal”, dalam sengketa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
2	Robert Ivie (2009) <i>The Complete Critism of Political Rhetoric</i>	Retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefenisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan manipulasi simbol politik.	Ahok mengartikulasikan bahasa-bahasanya, bahwa seorang pemimpin jabatan publik bukanlah pemimpin perusahaan, sudah seharusnya wajib berjuang untuk melayani kepentingan rakyat dan mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya.
3	Martin (2004) <i>Balancing on the political high wire The role of Humor in the rhetoric of Ann Richards</i>	Pemilihan kata-kata dan gaya berpidato pada humor dalam politik digunakan seorang <i>political actor</i> sebagai taktik untuk negosiasi dan reorganisasi.	Pada gaya bahasa Ahok menggunakan humor sebagai sarana mengidentifikasi khalayaknya untuk menyalurkan kritik atau <i>uneg-uneg</i> . Contohnya sikap Ahok mengkritik Wakil Ketua DPRD, Lulung dengan memberikan sindiran-sindiran yang dibalut bahasa sarkas di media.

Sumber: Olahan Peneliti,2017

5.1.1. Kekhasan Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

Atwater (2007) dalam jurnal penelitiannya *Senator Barack Obama The Rhetoric of Hope and The American Dream* mengeksplorasi retorika yang digunakan oleh senator Obama yang dikenal sebagai ahli pengelolaan kesan lewat dialognya yang merupakan *persuasion campaign* untuk mendapatkan simpati dan dukungan massa memilih Obama sebagai Presiden Kulit Hitam pertama di Amerika dengan menyentuh emosional warga Amerika melalui “*Politic of Hope*” menggunakan retorika tentang kisah hidup dan masa lalunya. Pidato Obama yang telah dikemas dalam bahasa yang mengandung wacana tertentu dengan memproyeksikan visi kesatuan politik untuk memikat hati warga Amerika yang mendengarkan.

Penelitian Atwater diatas telah mendukung serta memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menggunakan kajian komunikasi politik, *genre actor and rhetoric*. Atwater menunjukkan pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkap retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak. Kuatnya pesan yang disampaikan aktor sehingga hal tersebut menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat.

Implikasi dari penelitian Atwater terkait studi *political actor and rhetoric*, peneliti membahas Basuki Tjahaja Purnama menemukan kekhasan retorika Ahok terletak pada penggunaan bahasanya sebagai *style* yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan *powerful* sebagai bentuk strategi retorika dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat umum. Contohnya, penggunaan metafora, tampak ketika Ahok menyebut “rampok”, “maling”, “begal”, dalam sengketa ‘dana siluman’ RAPBD 2015

(Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta. Aristoteles (West & Turner, 2007, h. 346) menyarankan penggunaan metafora untuk membantu *audience* memahami hal-hal yang kurang jelas sehingga lebih mudah dipahami.

5.1.2. Artikulasi Bahasa Seorang Pejabat Publik

Robert Ivie (2009) dalam jurnal penelitiannya *The Complete Criticism of Political Rhetoric* melakukan penelitian terkait pidato Presiden Ronald Reagan yang disebut sebagai *the great communicator*. Dikarenakan ia mampu berkomunikasi dengan lawan maupun kawan politiknya dengan gayanya yang khas selebriti, Reagan sadar betul bagaimana peranan TV sebagai media sangat besar pengaruhnya. Reagan sangat piawai dalam berpidato, kata-katanya singkat namun tajam, Reagan mengkomunikasikan “sentimen bukan gagasan.” Keahliannya menguasai panggung politik dengan penggunaan pementasan, waktu dan bakat pribadi, serta kemampuannya mengimbangi masalah politik yang diciptakan oleh kata-katanya sendiri. Bahasa Reagan mampu menunjukkan bahwa “ia milik rakyat” merupakan pelayan yang melayani rakyat. Sementara bahasa non-verbal seperti gerak tubuh, senyum, intonasi suara, merupakan bagian dari kesan emosional yang diperlukan.

Artikel ini juga menjelaskan bahwa retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefinisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan manipulasi simbol politik. Kerusakan sosial diakibatkan oleh komunikasi politik yang buruk karena gagal mengartikulasikan kebutuhan sosial dan mentransmisikan nilai-nilai politik tersebut.

Hasil penelitian milik Ivie memiliki perbedaan dengan penelitian ini, Reagan ditampilkan sebagai aktor politik yang pandai membangun kesan baik di media. Memungkinkan Reagan yang memiliki agenda berlawanan namun tanpa terdengar seperti pemberontak sedangkan Ahok merupakan figur yang blak-blak-an, berintonasi tinggi bahkan

cenderung kasar dapat menimbulkan konfrontasi langsung. Hal ini tampak saat dirinya sedang berhadapan dengan Haji Lulung. Ahok kerap kali. Ia dengan lugas.

Kesamaan dari objek penelitian bahwa Ahok juga kerap kali mengartikulasikan bahasa-bahasanya, bahwa seorang pemimpin jabatan publik bukanlah pemimpin perusahaan, sudah seharusnya wajib berjuang untuk melayani kepentingan rakyat dan mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya yang merupakan implementasi dari bulir-bulir Pancasila.

"Kalau dulu saya liat orang miskin tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, saya pakai dompet saya. Saya pergi melayani orang dengan mobil saya. Ketika saya jadi pejabat, saya tidak pernah tahu apa itu uang bensin. Uang rakyat yang membayari saya. Saya hanya mendistribusikan uang itu kepada rakyat, jadi saya untung. Saya untung menolong orang dengan uang rakyat itu sendiri. Jadi, kalau rakyat memiliki pejabat yang mau menjadi penolong, jadi pelayan mereka, maka saya kira kita tidak akan mungkin melakukan korupsi." (Gunawan, 2013, h.111)

5.1.3. Gaya Bahasa Basuki Tjahaja Purnama

Martin (2004) dalam penelitiannya *Balancing on the political high wire the role of Humor in the rhetoric of Ann Richards* ini melakukan pemeriksaan retorika dari karir politik mantan Gubernur Texas Ann Richards yang mengungkapkan peranan penting retorika humor dalam strategi komunikasi politik perempuan. Richards menggunakan humor agar berhasil bernegosiasi peran pada sesuatu yang saling bertentangan atau menghambat, termasuk partai politik luar nasional terhadap Texas dan wanita terhadap politisi. Richards juga menggunakan humor sebagai taktik untuk negosiasi dan reorganisasi keunggulan dan subordinasi harapan gender dalam kehidupan publik.

Mengingat kasus Ann Richards tersebut, artikel ini membahas kendala dan peluang faktor sosial politik dan budaya daerah terhadap retorika politik perempuan. Akhirnya, analisis isi dan gaya berpidato politik Richards mengembangkan pemahaman tentang

bagaimana fungsi humor sebagai retorika dalam bernegosiasi. Hal ini juga menunjukkan salah satu cara wanita untuk dapat menantang gender yang telah dianggap marginal dalam dunia politik.

Hasil penelitian yang telah dilakukan Martin, mengatakan Humor dalam situasi sosial dapat dijadikan untuk mengidentifikasi khalayak. Humor dalam situasi politik merupakan strategi untuk meningkatkan popularitas. Komunikator dapat melakukan persuasi dengan efektif, karena hal ini telah direncanakan dan disiapkan dengan matang. Hal ini merupakan pembelajaran bagi semua orang, bahwa retorika itu seni bagaimana seseorang dapat menyampaikan secara efektif serta persuasif dan humor pun dapat digunakan sebagai senjata untuk mencapai tujuan tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Ann Richards.

Penelitian diatas dapat dikaitkan dengan gaya bahasa aktor politik Basuki Tjahaja Purnama berasal dari suku minoritas, menjadi gubernur bagi mayoritas masyarakat Betawi dan muslim di DKI Jakarta. Sikap dirinya sebagai oposisi dan pengkritik DPRD kerap kali memberikan sindiran-sindiran yang lugas dan langsung saat di undang dalam acara *Stand Up Comedy* pada Mei 2015 lalu. Dalam tesis sekaligus disertasi karya dari Wilson (2008) berjudul "*Was That Supposed to be Funny? A rhetorical Analysis of Politics, Problem, and Contradiction Stand-up Comedy*". Wilson meneliti mengenai kemungkinan humor atau lawakan sebagai bentuk aktivitas politik, ia tertarik pada efektivitas humor dalam politik, terutama saat ini, dimana dengan adanya *stand-up comedy* yang dapat dengan bebas dinikmati masyarakat dan tersebar luas melalui media massa. Tentu sebagai *rhetor* ahok yang dikenal tegas, dan berbicara lugas ia memiliki kesempatan untuk mengambil panggung *stand up comedy* untuk menyelipkan pesan politik melalui gaya bahasanya yang sarkas sebagai strategi komunikasinya kepada lawan politiknya.

Humor yang mengandung bahasa-bahasa sarkas yang digunakan Ahok sebagai sarana mengidentifikasi khalayaknya untuk menyalurkan kritik atau *uneg-uneg*. Sama halnya seperti yang dikatakan James Danandjaya (dalam Rahmanadji,2007, h.7) fungsi humor yang paling menonjol, yaitu sebagai sarana penyalur perasaan yang menekan diri seseorang. Perasaan itu bisa disebabkan oleh macam-macam hal, seperti ketidakadilan sosial, persaingan politik, ekonomi, suku bangsa, atau golongan. Tanpa dibalut kalimat yang berputar-putar. Masih terkait anggaran siluman, Ahok menyindir oknum DPRD DKI secara objektif yang mengusulkan pembelian *uninterruptible power supply* (UPS) kerap menjadi topiknya dalam komunikasi kepada lawan politiknya menimbulkan kesan agresif namun mengandung humor.

Tampilan bahasa humor diungkapkan Ahok ditonjolkan pada saat menanggapi-menanggapi pernyataan Haji Abraham Lunggana alias Lulung terkait kasus RAPBD pada tahun 2015, Sumber Waras, hingga PKL Tanah Abang. Bahasa-bahasa yang ditonjolkan Ahok kerap kali ditanggapi dengan santai oleh Ahok. Dari Hal tersebut tampaknya Ahok tidak menanggapi serius setiap perkataan Wakil Ketua DPR Tersebut Hal ini terucap langsung pada saat Ahok menanggapi perkataan lulung bahwa seharusnya Ahok pantas dijadikan tersangka RAPBD 2015 bahkan dirinya dianjurkan cek kesehatan jiwa:

“Saya memang agak sakit jiwa, Cuma pas diperiksa kesehatan jiwanya..Saya memang agak sakit jiwa, Cuma pas diperiksa lolos, pas gitu ukurannya. Sekarang ukurannya bukan tes kesehatan jiwa lagi. Harusnya mendagri bisa copot anggota dewan seperti itu. (Santosa,2015,h.189)

“Saya pikir Haji Lulung bukan sekolah Polisi ya, kalau dia sekolah Polisi saya akan usul kepada Pak Jokowi untuk menggantikan Pak Buas sebagai Kabareskrim, tapi sayang ga bisa, mohon maaf ya” (Metro TV,29 Juli 2015)

“Itu Sodara Lulung itu, dia harus belajar banyak hal lah, contohnya kalo punya Lamborgini itu bayar pajak, dia itu mungkin mau ditangkap KPK karena gratifikasi karena dia bilang dulu minjam itu lamborgininya” (Metro TV,17 Februari 2016)

Jika ditelaah, dilihat dari kalimat dan pilihan kata (diksi) yang digunakan Ahok kepada Lulung cukup frontal. Ahok menyindir Lulung yang berprofesi sebagai

pengacara namun tidak mengerti Hukum. Setiap kalimat yang ia lontarkan berupa pernyataan balasan skeptis terkait hal-hal yang menurutnya tidak benar. Bahasa-bahasa sarkas yang dilontarkan Ahok terkadang menohok dan mengharapakan orang lain yang mendengarnya membaca pikiran dan tujuan pembicarannya, meskipun tidak mengucapakan secara spesifiknya untuk itu tugas lawan bicaralah untuk mengetahui apa yang dimaksudnya.

5.2. Basuki Tjahaja Purnama dalam Studi Dramatisme

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat dominan seorang Basuki Tjahaja Purnama sebagai *agent* melalui dramatisme menempatkan pernak-pernik personal yang menyertai nilai motivasional seperti gagasan, keinginan, ketakutan, kedengkian, intuisi, imajinasi dan ekspresi personalitas lainnya. Melalui penjelasan Burke (West & Turner,2010,h.33) peneliti dapat melihat ciri-ciri yang dimiliki *agent* seperti ego, konsep diri, super ego, kesadaran, keinginan, objektif, pikiran, semangat dan ekspresi. *Agent* tidak hanya dipandang secara individual atau personal, tetapi dapat merupakan super person seperti ras, bangsa dan etnis misalnya (Suparno,2011,h.198).

Selain mengembangkan teori dramatisme, Burke juga menciptakan suatu metode untuk menerapkan teorinya terhadap sebuah pemahaman tentang aktivitas simbolik (West & Turner,2013,h.32-33). Metode tersebut adalah pentad, yang terdiri dari lima point antara lain *act* (apa yang sedang dilakukan), *scene* (dalam keadaan atau situasi apa tindakan dilakukan), *agent* (orang seperti apa yang melakukannya), *agency* (dengan cara apa ia melakukannya) dan *purpose* (untuk tujuan apa) (Weiser 2007, h.293). Dalam hal ini pentad berfungsi untuk menjelajah tata bahasa dari motif yang terus-menerus diciptakan melalui simbol oleh manusia (Rutten & Soetart, 2009,h.7). Sehingga pentad di maksudkan sebagai alat untuk menganalisa motif yang disajikan seseorang dalam wacana nya (Kneupper,1979,h.132).

Gambar 5.1 Basuki Tjahaja Purnama dalam Pentad Dramatisme

Sumber: Olahan Peneliti,2017

Tabel 5.2 Hasil Temuan Dramatisme

NO	Dasar Teori	Implikasi Penelitian	Hasil Temuan
1	Koehn (2010) <i>Ethical Eltism: A Burkean Analysis ogf the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush</i>	Dengan Analisis pentad mengungkapkan fokus retorika politik sekaligus motif dari penggunaan retorika yang dibangun seorang <i>political actor</i> .	Fokus retorika Ahok terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan Pemerintah yang bersih, transparan dan profesional.
2.	Schultz (2011) <i>A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse</i>	Dengan Analisis pentad mengungkapkan penebusan rasa bersalah.	Penebusan rasa bersalah Ahok tampak saat dirinya terlibat dalam kancah politik nasional berangkat dari rasa bersalah yang merasa miris melihat kondisi birokrasi pemerintah di Belitung Timur.
3	Suparno (2010) Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia.”	Dengan menggunakan teknik analisis pentad dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (<i>scene</i>) saling bersaing dan berkompetisi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan.	Melalui penelitian ini Dramatisme mengarahkan bahasa sebagai hal primer karena mengungkapkan ekspresi dari seseorang. Terlihat jelas saat Ahok menanggapi komentar balasan dari Lulung, gesture tubuh dan bahasa yang dilontarkan Ahok terdengar lebih spontan kepada lulung. Selain itu terlihat adanya benturan argumen dari kader Partai Gerindra yang menganggap Ahok sebagai ‘Kutu Loncat’ dan ‘Malin Kundang’ saat dirinya mendeklarasikan keluar dari keanggotaan Partai Gerindra.
4	Smudde & Courtright (2011) <i>A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation</i>	Melalui dramatisme menggunakan analisis pentad akan terlihat elemen <i>scapegoat</i> .	Melalui penemuan ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya kekonsistenan pada tindakan komunikasi politik Ahok melakukan penebusan menggunakan <i>scapegoat</i> kepada Lembaga Pemerintahan, Tatanan Kelola Pemerintahan DKI Jakarta, dan Media.

Sumber: Olahan Peneliti,2017

5.2.1. Fokus Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

Untuk itu Disertasi penelitian Koehn (2010) yang berjudul *Ethical Eltism: A Burkean Analysis of the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush* mendukung penelitian ini. Selain menggunakan pentad, artikel Koehn juga berada dalam studi pendekatan *political actor and rhetoric*. Penelitian tersebut menganalisis

pidato dan pernyataan yang disampaikan secara retorik Bush dalam masa jabatan pertamanya. Tujuannya untuk fokus melihat isu-isu moral dan etika yang coba dibangun Bush dalam setiap pidatonya. Hasilnya topik retorika yang digagas Bush terkait teror dan perang merupakan ancaman bagi keamanan global yang dialamatkan kepada negara Irak dan Afganistan bahwa Irak merupakan ancaman nuklir, nada yang sama juga ditekankan Bush saat memberikan pidato tentang Afganistan dia menjelaskan bahwa negara tersebut terdiri dari pemimpin korup yang menghancurkan orang-orang yang tinggal di Afganistan dan secara bersamaan menawarkan ancaman lanjutan ke AS. Dan isu-isu moral lain terkait menolak mengakui amandemen konstitusional pernikahan sesama jenis. Setiap pidatonya Bush sebagai *agent* memposisikan dirinya yang konservatif sebagai menjaga kehidupan manusia (*pro-life*) menolak pernikahan sesama jenis, secara tegas mendukung hukum yang melarang percobaan penelitian *embryonic stem cell* yang bertentangan dengan nilai-nilai kristiani ortodoks.

Implikasi dihasilkan oleh Koehn menunjukkan, penggunaan dramatisme serta analisis pentad dalam komunikasi politik terbukti bekerja dengan baik, sebagaimana hasil penelitian dari Koehn telah menunjukkan bahwa dramatisme telah mampu mengungkapkan bagaimana fokus retorika politik dari Ahok sekaligus motif dari penggunaan retorika tersebut. Sehingga hal ini sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menggunakan dramatisme serta analisis pentad.

Setelah melakukan analisis, peneliti dibantu menggunakan dramatisme untuk mengidentifikasi topik retorika Ahok, hasilnya adalah fokus retorika Ahok berdasarkan data adalah terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. Untuk mendukung itu Ahok perlu menampilkan dirinya sebagai sosok *rhetor* yang kredibel dan terpercaya. Agar komunikator dan komunikan memiliki persepsi yang sama terhadap isu yang disampaikan. Contohnya Ahok pernah dinobatkan sebagai “10 Tokoh Pilihan yang mengubah Indonesia” versi majalah Tempo (2006), peraih

pin emas pejuang demokrasi dari Forum Demokrasi (2006), dan penghargaan tokoh anti korupsi *Bung Hatta Anti Corruption Award* (2013).

5.2.2. Penebusan rasa bersalah

Jika dilihat kondisi politik Indonesia pada tahun 2004 itu terlihat bahwa tema-tema yang berkembang masih terkait tema legitimasi kekuasaan, marketing politik, *money-politic* hingga korupsi masih menjadi warna. Kekecewaan masyarakat atas hasil pemilu yang cukup berasal karena perilaku elit partai tidak menunjukkan contoh yang baik bagi khalayak (Firmanzah, 2010, h.91). Kesan bahwa politisi meninggalkan konstituennya dan hanya sibuk untuk kepentingan partainya atau kepentingan pribadinya semakin tampak. Parpol dicitrakan sebagai alat mencapai kekuasaan dan menumpuk kekayaan, sedangkan kekuasaan disalahgunakan untuk menangguk keuntungan dari masyarakat. Sehingga semakin jelas jarak antara pejabat selaku elit politik dan konstituennya semakin jauh.

Untuk itu Ahok sebagai *rhetor* berupaya memposisikan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) bukan hanya sebagai merekrut kader dan pendulang suara (*vote getter*) untuk keperluan kampanye. Namun pada masa itu ia dituntut untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk tidak apatis pada kondisi politik nasional. Pernyataan-pernyataan Ahok yang lugas, dan tegas dalam menangkis memberikan bantuan uang pada konstituen, menunjukkan terjadinya diskursus rasional di masyarakat. Salah satu senjata utama dalam argumentasi-argumentasi rasionalitas Ahok, melalui pernyataan-pernyataannya adalah keinginan mendudukan kembali substansi masalah yang pada saat itu menjadi subyek perdebatan di dalam *mindset* masyarakat. Contohnya mengatakan:

“Goblok!Goblok!Goblok! Kalian mendukung partai saya tanpa peduli, bahkan tanpa mengetahui apa ideologi partai saya yang penting karena sudah banyak mendapatkan bantuan (Santosa, 2015, h.72)”

”Coba bayangkan harga baju kaos bola yang hanya Rp15.000,-, mereka telah rela memberikan nasib mereka dan anak cucu kepada partai saya. Bayangkan Rp15.000,- kalau dibagi 5 tahun/bulan mereka baru bisa

mendapatkan RP250 per bulan. Sedangkan saya bisa memperoleh sekian juta rupiah. Di tambah jika saya tidak memperjuangkan jaminan sosial untuk mereka di APBD, maka mereka akan “dirampok” oleh biaya kesehatan, pendidikan dan modal kerja (Purnama,2008,h.31).

Kesimpulan dramatik dari Basuki Tjahaja Purnama diatas menunjukkan dominannya element *agent* dan *scene* berpengaruh dalam tindakan komunikasinya. Keputusan Ahok bergabung dengan Partai PIB disebabkan oleh rasa tak puas karena hanya bertindak sebagai penonton dalam kancah politik. Namun salah satu asumsi dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol (West & Turner,2013,h28). Masyarakat pada saat itu menganggap menjadi pejabat pasti akan berujung melakukan korupsi sehingga banyak orang mulai mencibirnya bahwa ia terlalu ambisius, gila dan tak tahu diri.

Untuk memperkuat penelitian, peneliti menggunakan artikel Schultz (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse* yang juga sama-sama menggunakan pendekatan dramatisme. Beliau berusaha menjelaskan motif dari tindakan menggunakan kerangka interpretasi Kenneth Burke ditujukan kepada pelaku pelecehan seksual di Amerika. Melalui penelitian ini wacana *moral panics* dibangun sebagai tindakan pencegahan hasil ekspos oleh surat kabar, masyarakat, badan legislatif, dan LSM. Pelaku yang melakukan kejahatan seksual akan dihukum, direhabilitasi dan akan diberikan label “Predator seksual” yang disimbolisasikan sebagai monster jahat, tua, kotor, serigala berbulu domba.

Hasilnya simbolisasi seperti itu akan membuat pelanggar mengalami perasaan bersalah dan penyesalan, rasa malu menghasilkan tindakan isolasi terhadap orang lain karena dianggap sangat keji. Melalui perspektif Burke, membantu kita memahami paksaan di balik sifat ketertiban sosial, dan bagaimana sang aktor didorong untuk pengorbanan untuk

mencapai penebusan. Burke berfokus pada cara di mana mendesak untuk pemurnian. Pengalaman dari rasa malu membujuk aktor tersebut untuk meredakan kesalahannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Schulz memiliki kesamaan dengan peneliti menggunakan kajian pentad drama selain meneliti retorika serta motif dari tindakan bahwa pentad drama juga dapat mengungkapkan rasa bersalah dan penebusan atas masa lalu seseorang. Perbedaannya Schulz berorientasi pada pelaku pelecehan seksual pada anak-anak sedangkan objek penelitian yaitu seorang aktor politik Basuki Tjahaja Purnama. Adapun jika dilihat melalui studi dramatisme, keinginan besar Ahok masuk dalam kancah politik nasional berangkat dari rasa bersalah yang merasa miris melihat tatanan hierarki (kondisi) birokrasi pemerintah yang korup. Sebagai mantan pengusaha CV Panda, dirinya pernah bertikai dengan para pejabat yang meminta menanggung keuntungan bersama, namun ia dengan tegas menolak untuk menafkahi para pejabat nakal dan memilih untuk menutup pabrik. Untuk itu ia ingin melakukan penebusan rasa bersalahnya dengan menjadi pejabat publik untuk mematahkan stigma negatif:

“Saya ingin membuktikan, anggapan orang-orang bahwa pejabat pasti korup, pejabat tidak pernah benar-benar bekerja untuk rakyat, itu salah. Stigma itu mau saya lawan, boleh diuji!” ungkap Ahok (Santosa,2015,h.xi).

Bagi Burke, proses rasa bersalah dan penebusan mengamankan keseluruhan konsep simbolisasi. Rasa bersalah, adalah motif utama untuk semua aktivitas simbolik. Karena kita terus menerus, merasa bersalah, kita juga terus berusaha untuk memurnikan diri kita sendiri dari ketidaknyamanan rasa bersalah (West & Turner,2010,h.30). Proses rasa bersalah tersebut merupakan siklus awal bagi Ahok untuk masuk politik nasional.

5.2.3. **Pertarungan Wacana Ahok VS Lulung dan Partai Gerindra**

Dalam perkembangan situasi (*scene to scene*), adanya argumen-argumen sentral yang berkembang di sekitar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Wakil Ketua DPRD DKI

Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung. Ahok, sebagai aktor politik yang tidak segan-segan membalas komentar yang terlontar dari Lulung, begitu pun sebaliknya. Hampir setiap program yang disuguhkan Ahok akan kembali dikomentari oleh Haji Lulung.

Perdebatan awal Haji Lulung dan Ahok bermula saat Ahok menyebut kecurigaannya ada mark up anggaran pengadaan alat *Uninterruptible Power Supply (UPS)* terbukti menyusul penetapan oknum DPRD DKI Jakarta sebagai tersangka. Ucapan Ahok membuat panas telinga Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung dan kawan-kawannya. Saut-sautan bertambah panas ketika Lulung juga ikut angkat bicara dengan meminta Ahok berhati-hati dalam ucapannya.

Melalui Dramatisme mengarahkan bahasa sebagai hal primer karena mengungkapkan ekspresi dari seseorang. Terlihat jelas saat Ahok menanggapi komentar balasan dari Lulung, gesture tubuh dan bahasa yang dilontarkan Ahok terdengar lebih spontan kepada Lulung.

“Mohon dibantu juga kalau punya Lamborghini, pelat nomornya jangan bodong, biar bayar pajak. Jadi kalau kaya, terus punya Lamborghini, STNK-nya yang benar bayar pajak gitu lho. Bantu kita supaya pendapatan pajak kita nambah”(Tempo,13 Februari 2013)

Selain benturan argumen dengan Haji Lulung, peneliti juga menyajikan benturan Ahok dengan Partai Gerindra, merupakan partai pengusung Ahok menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 2014 silam. Melalui dramatik tersebut bahwa elemen *scene* dan *agent* adalah yang paling dominan dan berpengaruh dalam tindakan komunikasi serta motif dari sikap politik Ahok. Alur *scene* yang dimulai dari pilpres 2014 yang telah usai, namun kontestasi pilpres masih sangat terasa kental. Untuk itu tema-tema sentral pada saat itu yang berkembang seputar keterbelahan dua koalisi besar, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), perbedaan pandangan RUU Pilkada, dan dualisme kepemimpinan partai membuat kompas politik nasional berubah arah Koalisi Merah Putih

(Gerindra, Golkar PKS, PAN, PPP dan Demokrat) pengusung Prabowo-Hatta, mengadakan sidang paripurna untuk melakukan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Sikap yang diambil KMP dianggap politik balas dendam karena gagal “menduduki” Istana Negara. Sementara SBY dari Demokrat sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dinilai rakyat sebagai penghianat demokrasi karena dianggap tidak menepati janjinya untuk mendukung pilkada langsung.

Peran Ahok disini sebagai *agent* juga disoroti, karena tujuan dari dramatisme adalah untuk melihat motif dari tindakan komunikasinya. Sikap politik zig-zagnya terlihat saat dirinya tidak sepakat dengan rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Hal tersebut dianggapnya seperti membuka luka lama zaman rezim gaya Orde Baru. Dulu tekad Ahok masuk Gerindra, karena memiliki ideologi yang sama. Gerindra berani mencalonkan dirinya karena rekam jejaknya walaupun berasal dari kalangan minoritas. Sebagai tokoh yang idealis, Ahok menyakini posisi Cawagub DKI Jakarta merupakan batu loncatan strategis selain untuk menunjukkan integritas sebagai politikus juga memberikan tontonan kepada masyarakat bahwa pilkada langsung rakyat mendapatkan kesempatan untuk memilih kepala daerah yang bersih, transparan, dan profesional.

Namun surat pengunduran dirinya pada keanggotaan Gerindra sebagai jawaban atas sikap perbedaan pandangan politiknya terkait Rancangan Undang Undang Pilkada yang diusulkan kepala daerah akan langsung dipilih oleh DPRD. Sedangkan ahok berpandangan bahwa pilkada mesti dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pengunduran dirinya memancing sejumlah reaksi sebagian besar aktor politik mendefenisikan sikap ahok sebagai politikus kutu loncat dan pragmatis. Hal tersebut mengingatkan kembali bahwa sebelum dipinang Gerindra, Ahok juga melakukan loncatan dari Golkar yang menghantarkannya ke kursi DPR RI yang dijalaninya selama dua setengah tahun.

Tampaknya sikap politik Ahok berusaha disimbolisasikan aktor politik lain. Sesuai dengan asumsi dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengaku kecewa dan menilai Ahok sebagai politikus oportunistis yang tidak mengerti etika yang menganggap partai sebagai '*kutu loncat*'. Sedangkan M.Taufik, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta menantang kekonsistenan Ahok, untuk mundur dari jabatan gubernur karena partai Gerindra yang berjasa menghantarkannya untuk menjadi Wakil Gubernur pada 2014 silam (Tempo, September 2014). Ahok jadi bulan-bulanan kader Gerindra bahkan ia dinilai sebagai Malin Kundang, Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J.Mahesa, kecewa kalau Ahok mundur sebagai kader yang telah membesarkannya. Desmond mensimbolisasikan Partai Gerindra seperti Ibu yang membesarkan Ahok (Santosa,2015,h.269).

Selepas Ahok dari Gerindra, tawaran dari Hanura, PKB dan PDIP pun berkumandang di media cetak dan elektronik. Presiden terpilih Joko Widodo mengapresiasi langkah Ahok keluar dari Gerindra, "Menurut saya, itu sebuah keberanian sikap beliau. Harus dihargai, Pak Ahok pasti merasakan sendiri bahwa Pilkada langsung menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan demokratis." Selain memuji, Jokowi mengaku senang jika Ahok berlabuh di PDI Perjuangan. "Kalau benar, berarti saya dapat satu ya," kata Jokowi (Kuwado,2014). Tuduhan terhadap dirinya sebagai politikus oportunistis tersebut salah alamat. Ahok meyakini bahwa tradisi meloncat dari satu partai ke partai lain, dari satu jabatan ke jabatan lain, merupakan masalah ambisi, tetapi ambisi tersebut berguna bagi masyarakat luas dan manusia harus memiliki ambisi untuk bisa sukses.

Melalui dramatisme peneliti menghasilkan penemuan dari *scene* ini peneliti melihat adanya pertarungan wacana yang bersinggungan dengan Ahok. Jejak-jejak pesan yang mereka artikulaskan menjelaskan bagaimana satu isu dengan isu lain dapat bersinggungan, bertentangan, untuk menunjukkan bagaimana bahasa yang digunakan untuk melakukan

seleksi, refleksi, defleksi (pembelokan) terhadap realitas yang disesuaikan dengan kepentingan mereka (Suparno,2012,h.115).

Suparno (2010) melalui disertasinya mendemostrasikan penggunaan dramatisme mampu memunculkan unsur-unsur motif kontestasi antar aktor politik dengan judul penelitian “Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia.” Data yang digunakan Suparno ialah berupa penelusuran pernyataan-pernyataan surat kabar Kompas sepanjang tahun 1997 sampai 1998. Dengan menggunakan teknik analisis pentad dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (*scene*) saling bersaing dan berkompetisi terhadap makna Reformasi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan. Dalam konteks ini, tindakan aktor dapat memperlihatkan apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang sama atau apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Suparno di atas mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penggunaan bahasa dalam sebuah pernyataan, sikap serta tindakan komunikasi dari Basuki Tjahaja Purnama di berbagai *scene*, mengandung makna dan motif tertentu. Peneliti juga menyajikan pernyataan-pernyataan verbal aktor-aktor yang pro dan kontra dari berbagai perspektif berbeda yang saling bersaing sehingga menimbulkan *clash of argument*.

Perubahan sikap antiklimaks Basuki Tjahaja Purnama saat memilih meninggalkan partai Gerindra menimbulkan spekulasi liar yang menuntut jawaban pasti. Narasi yang dibawakan Basuki Tjahaja Purnama dalam hal ini dapat membuat *misleading* opini dari lawan politiknya. Inilah jejak-jejak komunikasi yang memperlihatkan ada persaingan komunikasi yang menggambarkan kepentingan dari tiap-tiap individu yang diusahakan. Pada satu sisi, pihak yang kontra dengan pengunduran Ahok dari Gerindra mensymbolisasikan

Ahok sebagai “kutu loncat”, penghianat partai, malin kundang, serta arogansi kekuasaan. Sedangkan pihak pro dengan Ahok, diartikulasikan sedemikian rupa melalui penggambaran sebuah idealisme, sesuai koridor konstitusi, nasionalisme tinggi dan agung, serta menjunjung nilai demokrasi. Didukung oleh narasi politiknya yang disampaikan di Metro TV (September,2014) bahwa dirinya hanya loyal kepada partai yang sesuai konstitusi.

Berdasarkan pada rasio dramatik di atas, hasilnya menunjukkan bahwa elemen *agent* dan *purpose* merupakan elemen yang paling dominan dan berpengaruh dalam tindakan retorik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Latar belakang Ahok sebagai eksekutif pemerintahan, ia merasa memang tindakan (*act*) yang dilakukannya sudah benar karena dirinya taat pada konstitusi bukanlah konstituen.

5.2.4. Pengkambing Hitam (*Scapegoat*)

Melalui analisis dramatisme penulis juga mendapat temuan bahwa adanya negativitas dalam situasi ini yakni adanya penolakan terhadap sesuatu dalam tatanan sosial (west & turner,2008,h.31). Pada awalnya penertiban kebijakan relokasi PKL pasti ada masyarakat yang pro dan kontra akan kehadiran kebijakan tersebut. Bagi pihak yang kontra dapat dikatakan dalam pola negativitas. Masyarakat yang berada dalam tatanan sosial yang sudah ada berusaha melindungi diri dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini dianggap berbeda dalam tatanan sosial yang terbentuk. Terlihat pada saat upaya penertiban PKL di Tanah Abang oleh Ahok menuai kecaman dari berbagai paguyuban.

Merujuk pada hasil akhir yang ada dalam benak *agent* dan tindakan. Tentu di dalamnya memiliki motif tersembunyi yang alurnya akan membentuk drama. *Guilt-Redemption Cycle* merupakan akar semua retorik. Burke yakin, bahwa motivasi terakhir dari semua aktor adalah untuk membersihkan diri kita dari *guilt* yang pernah di alami aktor. Dalam situasi ini, untuk mengadministrasi keadilan sosial Ahok sebagai eksekutor

pemerintah berusaha menunjukkan dirinya tunduk pada konstitusi bukan konstituen. Aktor politik meyakinkan khalayak melalui pernyataan-pernyataannya bahwa ada sesuatu yang salah dan harus diubah yang menimbulkan *guilt* dalam diri khalayak. Burke menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang perfeksionis. Manusia ingin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kemauannya (Safitri,2014,h.15). Dalam diri khalayak yang merasakan *guilt* ini, akan ada *perspective of incongruity* yaitu ketidaksesuaian atau sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Ini tentu menggali sikap perfeksionis manusia. Untuk menghilangkan perasaan ketidaksempurnaan ini, manusia berpikir harus ada pihak yang disalahkan atas *incongruity* ini. Karenanya, Burke menganggap retorik adalah pencarian khalayak akan kambing hitam (*scapegoat*) yang sempurna.

Untuk menghilangkan *guilt*, menurut Burke, aktor mempunyai dua pilihan, yakni menyalahkan diri sendiri (*mortification*) dan mencari *scapegoat*, faktor eksternal sebagai pihak yang bersalah untuk bertanggung jawab (West & Turner,2008,h.31). Dalam drama politik yang terjadi, penulis melihat kecenderungan Ahok mencari *scapegoat* berbanding lurus dengan elemen *purpose* yakni, Ahok meyakini bahwa kecaman (pihak yang kontra) tersebut hanya berasal dari orang-orang yang kepentingan terusik di sekitar Pasar Tanah Abang, seperti; penyewa lapak, dan praktek premanisme yang diduga banyak dilakukan pungli oleh penguasa Tanah Abang termasuk di-*backup* oleh berbagai kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Hal tersebut diperkuat oleh argumen Ahok, yang menyatakan:

“Kenapa yang suka ribut itu itu yang nyewain lapak, atas nama paguyuban, persatuan. Kamu kalo jual-jual lapak, *gue penjara lu!* Jadi sebenarnya penyewa lapaknya yang saya marahi bukan PKLnya”.
(Sumber Dokumentasi: Kick Andy, Kontroversi Ahok,2016)

“Saya taat konstitusi bukan konstituen, tapi Jakarta anda lakukan apa saja akan menyenggol orang karena begitu banyak kepentingan. Tapi coba pikirkan baik-baik pernah tidak dalam sejarah tanah abang blok tanah abang dibagikan secara gratis”
(Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

Jika penulis menghubungkan dengan artikel Smudde & Courtright (2011) *A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation*, dalam penelitiannya melakukan analisis menggunakan *pentad* terkait masalah sehari-hari dalam mengelolapara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dilakukan bagi seorang praktisi *Public Relation*. Dengan menggunakan analisis *pentad*, maka akan membantu praktisi *Public Relation* untuk melakukan analisis dan perencanaan, identifikasi, penciptaan, peningkatan hubungan dengan *stakeholder*. Di tingkat ini *hexad* mengungkap dimensi mikropis penting bagi *stakeholder*. Pada akhirnya kombinasi analisis teori dan kasus disintesis menjadi pendekatan prospektif terhadap manajemen pemangku kepentingan yang mungkin digunakan organisasi selama perencanaan strategis.

Smudde & Courtright mengisahkan *The Black Dog Tavern* di Martha's Vineyard merupakan perusahaan terbesar di pulau tersebut dan memiliki hubungan positif dengan pemangku kepentingan karyawan dan masyarakat sebelum tahun 2001. Namun seiring perganti kepemimpinan digantikan putra pendiri perusahaan tersebut. CEO baru tersebut melakukan berbagai kebijakan strategis baru yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Ia memotong separuh tenaga kerja, menghapuskan putaran pembayaran sepanjang tahun dan menutup kedai minum selama 3 bulan pada musim dingin berikutnya. Hasilnya mengakibatkan kemarahan masyarakat, beberapa orang berpikir sumber masalah berasal dari perubahan (*gulit*) yang dijadikan *scapegoat*. CEO baru tersebut menerima kesalahan tersebut namun membenarkannya dengan argumen transenden bahwa kesehatan keuangan perusahaan lebih penting (*redemption*). Meskipun kepercayaan kepuasan lokal telah dilanggar, *The Black Dog Tavern* tetap menjadi penting bagi stakeholders (terutama turis dan pelanggan online yang menginginkan koleksi terbaru dan logo *The Black Dog Tavern*).

Implikasi artikel Smudde & Courtright dengan penelitian ini memiliki banyak segi kesamaan. Namun penulis berfokus pada retorika seorang aktor politik. Pada scene ini PKL

Tanah Abang sebelumnya tidak pernah terusik pada pemerintahan Fauzi Wibowo-Prijanto, namun pada saat masa pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama memberikan dampak pada pembenahan birokrasi dan perubahan iklim komunikasi Pemprov DKI terkait eksekusi penertiban PKL Pasar Tanah Abang. Perubahan pada pemerintahan Ahok dianggap tidak mengedepankan dialog dengan tokoh masyarakat dan mengkritik gaya komunikasi Ahok yang dinilai *low context* untuk masyarakat di Jakarta. Mayoritas masyarakatnya Jawa dan Betawi, seringkali ucapan Ahok menjadi persoalan. Sementara masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat Asia umumnya, berbudaya konteks tinggi (Mulyana, dikutip dari Edward T.Hall 1966,1976).Hal tersebut dibuktikan ketika para pengunjung rasa RAJJAM AHOK (Rakyat Jakarta Jahit Mulut Ahok) yang berasal dari paguyuban Betawi Bersatu mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, memperkarakan bicara Ahok yang selama ini keras, khususnya tudingan tentang oknum DPRD dan preman-preman yang mem-backing PKL Pasar Tanah Abang.

Scene di atas memperlihatkan bahwa Ahok yang dijadikan *scapegoat* untuk menebus perubahan pada iklim komunikasi Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, Ahok adalah aktor utama yang diposisikan sebagai akar dari permasalahan sehingga ia dipersalahkan, dan dihujat para pengunjung rasa tersebut. Menurut Suparno (2012,h.197) pengorbanan merupakan gambaran bagaimana seseorang melakukan perlawanan melalui sinisme terhadap kondisi yang dihadapinya. Sedangkan Ahok menyakini Pemprov DKI sudah melakukan sosialisasi sebelum eksekusi kebijakan relokasi penertiban PKL Pasar Tanah Abang. Sama halnya dengan salah satu asumsi teori dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Ahok mengetahui persis bahwa kentalnya praktik premanisme dengan aksi sewa lapak yang mahal di Tanah Abang dan keinginan para PKL berjualan dipinggir jalan merugikan rakyat menengah kebawah dan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum (*scapegoat*). Untuk itu sebagian masyarakat juga memaknai bahwa tindakan

Ahok memberikan rasa keadilan dengan mengembalikan fasilitas umum pada fungsinya melalui penegakan Perda Ketertiban Umum sudah tugasnya sebagai eksekutor kebijakan. Ahok juga menyiratkan dengan kata-kata bahwa tindakannya tersebut didukung oleh masyarakat khususnya Jokowi, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu.

“Kami lagi bangun pasar, retribusi harian, tidak disewakan, tapi anda tidka boleh curang, cucu anda tidak boleh dapat warisan kalau tidak Jakarta ini dikuasai orang kaya semua. Saya mengerti sekali semua PKL itu pengen di pinggir jalan.” Kata Ahok dengan tenang

(Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

“Beliau (Jokowi) instruksikan pada saya penyebab macet adalah PKL ini. Semua sudah tahu kan, tinggal eksekusi. Nah, itu apa persoalannya? Tinggal kamu punya nyali nggak? Karena kamu akan menyenggol oknum pedagang sama oknum Konglomerat, ya”

(Detik.com, Agustus 2013)

Melalui penemuan ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya kekonsistenan pada tindakan komunikasi politik Ahok melakukan penebusan menggunakan *scapegoat* :

5.1.1 Hasil Temuan *Scapegoat*

NO	Tatanan kelola pemerintahan DKI Jakarta	Lembaga Negara	Media
1	Pada <i>scene</i> Ahok bersitengang dengan Badan Pengawas Keuangan DKI Jakarta (BPK) terkait kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, pada <i>scene</i> tersebut Ahok mengkritik (<i>purpose</i>) agar BPK memperbaiki kinerja, kecermatan, objektif dalam evaluasi proses audit anggaran serta independen tanpa mudah ditunggangi oleh kepentingan politis karena menurutnya banyak oknum-oknum yang	Pada saat Ahok menjabat menjadi anggota DPR RI Komisi II, Ahok aktif memberikan kritik dan argumen kontroversial tentang mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kritik Ahok ditujukan kepada Bawaslu dan KPU untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan terobosan upaya menghindari	Pada <i>scene</i> Ahok melontarkan pernyataan bahwa berita yang ditayangkan TV ONE menyatakan banyak sekali fitnah dan pemberitaan yang dianggap tidak logis kontennya tidak <i>fair</i> dan menggiring opini untuk menjatuhkan citra Pemprov DKI.

	berlindung dibawah naungan pemerintah.	kecurangan dalam pemungutan suara, dan menciptakan iklim perpolitikan yang kondusif di mana individu-individu yang idealis dan bersih, transparan dan profesional serta mampu bersaing secara sehat	
2.	Pada <i>scene</i> sengketa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Ahok menegaskan praktek gelap memainkan anggaran masi terus terjadi. Ahok mengkritik keras anggota DPRD yang tidak suportif dalam upaya mewujudkan Bersih, Transparan, dan Profesional dalam roda pemerintahan Indonesia khususnya melalui pengelolaan anggaran daerah yang dilakukan menggunakan sistem <i>e-budgeting</i> .		
3	Pada <i>scene</i> Ahok mengkritik Komnas HAM dan warga yang menghambat relokasi Kalijodo, pada <i>scene</i> tersebut Ahok memberikan penekanan (<i>purpose</i>) agar Komnas HAM melakukan langkah yang harmonis dan sinergis dengan Pemprov DKI dalam menegakkan Perda untuk mengembalikan hak-hak negara sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) atas tanah ilegal yang dibuat warga menjadi pemukiman dan kawasan prostitusi yang sudah mengakar di		

PEMBAHASAN DAN DISKUSI PENELITIAN

5.1. Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama sebagai *political actor*

Pembahasan yang akan dianalisis peneliti yaitu berdasarkan data temuan penelitian terkait Retorika politik Basuki Tjahaja Purnama. Retorika politik bisa dipahami sebagai salah satu strategi persuasi untuk meyakinkan orang lain. Dalam konteks komunikasi politik, banyak orang yang menyamakan retorika dengan propaganda. Zamawi dan Johnston membedakan keduanya secara gamblang:

A Useful distinction to make at this point is between the persuasion of rhetoric, which seeks to find compelling arguments to convince people, and the coercion of propaganda, which insist people believe certain thing or act in certain way by using communication techniques to end discussion (Johnston dan Zawawi,2000,h.282)

Retorika mengedepankan argumentasi-argumentasi sedangkan propaganda lebih mirip paksaan, tak memberikan ruang bagi publik untuk berpikir dan berwacana. Finnemore mengatakan (Jackson & Krebs,2007,h.6) mekanismenya *political actor* berusaha mengembangkan pemahaman bersama dan dapat dikatakan sebagai persuasi untuk mencapai “klaim normatif.” Sasarannya untuk menginternalisasi keyakinan baru dan akibatnya mengadopsi identitas dan referensi baru. Tindakan *agent* menjadi struktur sosial, gagasan menjadi norma, dan subjektif menjadi intersubjektif.

Nimmo (2011,h.30) mengatakan perlunya para komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka di dalam masyarakat harus ditetapkan, yaitu Politisi (wakil dan ideolog), komunikator profesional (promotor dan jurnalis) dan aktivis (juru bicara dan pemuka pendapat). Dalam penelitian ini klasifikasi Basuki Tjahaja Purnama termasuk dalam komunikator politik kategori politisi ideolog karena ia merupakan produk dari proses

kaderisasi, meniti karir politik dimulai menjadi ketua Dewan Perwakilan Cabang PPIB (Partai Perhimpunan Indonesia Baru) Kabupaten Belitung Timur.

Hasil analisis data yang telah dikemukakan pada Bab IV sebelumnya dihubungkan dengan konsep-konsep yang dikemukakan pada Bab II merupakan dasar untuk pembahasan sesuai dengan tujuan akhir penelitian yang berjudul **“Studi Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* Tokoh Basuki Tjahaja Purnama Dalam Perspektif Dramatisme”**.

Tabel 5.1 Hasil Temuan Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

NO	Dasar Teori	Implikasi Penelitian	Hasil Temuan
1.	Atwater (2007) <i>Senator Barack Obama The Rhetoric of Hope and The American Dream</i>	Pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkapkan retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak sehingga menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat.	Kekhasan retorika Ahok terletak pada penggunaan bahasanya sebagai <i>style</i> yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan <i>powerful</i> . Contohnya penggunaan metafora, “rampok”, “maling”, “begal”, dalam sengketa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
2	Robert Ivie (2009) <i>The Complete Critism of Political Rhetoric</i>	Retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefenisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan manipulasi simbol politik.	Ahok mengartikulasikan bahasa-bahasanya, bahwa seorang pemimpin jabatan publik bukanlah pemimpin perusahaan, sudah seharusnya wajib berjuang untuk melayani kepentingan rakyat dan mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya.
3	Martin (2004) <i>Balancing on the political high wire The role of Humor in the rhetoric of Ann Richards</i>	Pemilihan kata-kata dan gaya berpidato pada humor dalam politik digunakan seorang <i>political actor</i> sebagai taktik untuk negosiasi dan reorganisasi.	Pada gaya bahasa Ahok menggunakan humor sebagai sarana mengidentifikasi khalayaknya untuk menyalurkan kritik atau <i>uneg-uneg</i> . Contohnya sikap Ahok mengkritik Wakil Ketua DPRD, Lulung dengan memberikan sindiran-sindiran yang dibalut bahasa sarkas di media.

Sumber: Olahan Peneliti,2017

5.1.1. Kekhasan Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

Atwater (2007) dalam jurnal penelitiannya *Senator Barack Obama The Rhetoric of Hope and The American Dream* mengeksplorasi retorika yang digunakan oleh senator Obama yang dikenal sebagai ahli pengelolaan kesan lewat dialognya yang merupakan *persuasion campaign* untuk mendapatkan simpati dan dukungan massa memilih Obama sebagai Presiden Kulit Hitam pertama di Amerika dengan menyentuh emosional warga Amerika melalui “*Politic of Hope*” menggunakan retorika tentang kisah hidup dan masa lalunya. Pidato Obama yang telah dikemas dalam bahasa yang mengandung wacana tertentu dengan memproyeksikan visi kesatuan politik untuk memikat hati warga Amerika yang mendengarkan.

Penelitian Atwater diatas telah mendukung serta memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menggunakan kajian komunikasi politik, *genre actor and rhetoric*. Atwater menunjukkan pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkap retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak. Kuatnya pesan yang disampaikan aktor sehingga hal tersebut menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat.

Implikasi dari penelitian Atwater terkait studi *political actor and rhetoric*, peneliti membahas Basuki Tjahaja Purnama menemukan kekhasan retorika Ahok terletak pada penggunaan bahasanya sebagai *style* yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan *powerful* sebagai bentuk strategi retorika dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat umum. Contohnya, penggunaan metafora, tampak ketika Ahok menyebut “rampok”, “maling”, “begal”, dalam sengketa ‘dana siluman’ RAPBD 2015

(Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta. Aristoteles (West & Turner, 2007, h. 346) menyarankan penggunaan metafora untuk membantu *audience* memahami hal-hal yang kurang jelas sehingga lebih mudah dipahami.

5.1.2. Artikulasi Bahasa Seorang Pejabat Publik

Robert Ivie (2009) dalam jurnal penelitiannya *The Complete Criticism of Political Rhetoric* melakukan penelitian terkait pidato Presiden Ronald Reagan yang disebut sebagai *the great communicator*. Dikarenakan ia mampu berkomunikasi dengan lawan maupun kawan politiknya dengan gayanya yang khas selebriti, Reagan sadar betul bagaimana peranan TV sebagai media sangat besar pengaruhnya. Reagan sangat piawai dalam berpidato, kata-katanya singkat namun tajam, Reagan mengkomunikasikan “sentimen bukan gagasan.” Keahliannya menguasai panggung politik dengan penggunaan pementasan, waktu dan bakat pribadi, serta kemampuannya mengimbangi masalah politik yang diciptakan oleh kata-katanya sendiri. Bahasa Reagan mampu menunjukkan bahwa “ia milik rakyat” merupakan pelayan yang melayani rakyat. Sementara bahasa non-verbal seperti gerak tubuh, senyum, intonasi suara, merupakan bagian dari kesan emosional yang diperlukan.

Artikel ini juga menjelaskan bahwa retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefinisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan manipulasi simbol politik. Kerusakan sosial diakibatkan oleh komunikasi politik yang buruk karena gagal mengartikulasikan kebutuhan sosial dan mentransmisikan nilai-nilai politik tersebut.

Hasil penelitian milik Ivie memiliki perbedaan dengan penelitian ini, Reagan ditampilkan sebagai aktor politik yang pandai membangun kesan baik di media. Memungkinkan Reagan yang memiliki agenda berlawanan namun tanpa terdengar seperti pemberontak sedangkan Ahok merupakan figur yang blak-blak-an, berintonasi tinggi bahkan

cenderung kasar dapat menimbulkan konfrontasi langsung. Hal ini tampak saat dirinya sedang berhadapan dengan Haji Lulung. Ahok kerap kali. Ia dengan lugas.

Kesamaan dari objek penelitian bahwa Ahok juga kerap kali mengartikulasikan bahasa-bahasanya, bahwa seorang pemimpin jabatan publik bukanlah pemimpin perusahaan, sudah seharusnya wajib berjuang untuk melayani kepentingan rakyat dan mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya yang merupakan implementasi dari bulir-bulir Pancasila.

"Kalau dulu saya liat orang miskin tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, saya pakai dompet saya. Saya pergi melayani orang dengan mobil saya. Ketika saya jadi pejabat, saya tidak pernah tahu apa itu uang bensin. Uang rakyat yang membayari saya. Saya hanya mendistribusikan uang itu kepada rakyat, jadi saya untung. Saya untung menolong orang dengan uang rakyat itu sendiri. Jadi, kalau rakyat memiliki pejabat yang mau menjadi penolong, jadi pelayan mereka, maka saya kira kita tidak akan mungkin melakukan korupsi." (Gunawan, 2013, h.111)

5.1.3. Gaya Bahasa Basuki Tjahaja Purnama

Martin (2004) dalam penelitiannya *Balancing on the political high wire the role of Humor in the rhetoric of Ann Richards* ini melakukan pemeriksaan retorika dari karir politik mantan Gubernur Texas Ann Richards yang mengungkapkan peranan penting retorika humor dalam strategi komunikasi politik perempuan. Richards menggunakan humor agar berhasil bernegosiasi peran pada sesuatu yang saling bertentangan atau menghambat, termasuk partai politik luar nasional terhadap Texas dan wanita terhadap politisi. Richards juga menggunakan humor sebagai taktik untuk negosiasi dan reorganisasi keunggulan dan subordinasi harapan gender dalam kehidupan publik.

Mengingat kasus Ann Richards tersebut, artikel ini membahas kendala dan peluang faktor sosial politik dan budaya daerah terhadap retorika politik perempuan. Akhirnya, analisis isi dan gaya berpidato politik Richards mengembangkan pemahaman tentang

bagaimana fungsi humor sebagai retorika dalam bernegosiasi. Hal ini juga menunjukkan salah satu cara wanita untuk dapat menantang gender yang telah dianggap marginal dalam dunia politik.

Hasil penelitian yang telah dilakukan Martin, mengatakan Humor dalam situasi sosial dapat dijadikan untuk mengidentifikasi khalayak. Humor dalam situasi politik merupakan strategi untuk meningkatkan popularitas. Komunikator dapat melakukan persuasi dengan efektif, karena hal ini telah direncanakan dan disiapkan dengan matang. Hal ini merupakan pembelajaran bagi semua orang, bahwa retorika itu seni bagaimana seseorang dapat menyampaikan secara efektif serta persuasif dan humor pun dapat digunakan sebagai senjata untuk mencapai tujuan tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Ann Richards.

Penelitian diatas dapat dikaitkan dengan gaya bahasa aktor politik Basuki Tjahaja Purnama berasal dari suku minoritas, menjadi gubernur bagi mayoritas masyarakat Betawi dan muslim di DKI Jakarta. Sikap dirinya sebagai oposisi dan pengkritik DPRD kerap kali memberikan sindiran-sindiran yang lugas dan langsung saat di undang dalam acara *Stand Up Comedy* pada Mei 2015 lalu. Dalam tesis sekaligus disertasi karya dari Wilson (2008) berjudul "*Was That Supposed to be Funny? A rhetorical Analysis of Politics, Problem, and Contradiction Stand-up Comedy*". Wilson meneliti mengenai kemungkinan humor atau lawakan sebagai bentuk aktivitas politik, ia tertarik pada efektivitas humor dalam politik, terutama saat ini, dimana dengan adanya *stand-up comedy* yang dapat dengan bebas dinikmati masyarakat dan tersebar luas melalui media massa. Tentu sebagai *rhetor* ahok yang dikenal tegas, dan berbicara lugas ia memiliki kesempatan untuk mengambil panggung *stand up comedy* untuk menyelipkan pesan politik melalui gaya bahasanya yang sarkas sebagai strategi komunikasinya kepada lawan politiknya.

Humor yang mengandung bahasa-bahasa sarkas yang digunakan Ahok sebagai sarana mengidentifikasi khalayaknya untuk menyalurkan kritik atau *uneg-uneg*. Sama halnya seperti yang dikatakan James Danandjaya (dalam Rahmanadji,2007, h.7) fungsi humor yang paling menonjol, yaitu sebagai sarana penyalur perasaan yang menekan diri seseorang. Perasaan itu bisa disebabkan oleh macam-macam hal, seperti ketidakadilan sosial, persaingan politik, ekonomi, suku bangsa, atau golongan. Tanpa dibalut kalimat yang berputar-putar. Masih terkait anggaran siluman, Ahok menyindir oknum DPRD DKI secara objektif yang mengusulkan pembelian *uninterruptible power supply* (UPS) kerap menjadi topiknya dalam komunikasi kepada lawan politiknya menimbulkan kesan agresif namun mengandung humor.

Tampilan bahasa humor diungkapkan Ahok ditonjolkan pada saat menanggapi-menanggapi pernyataan Haji Abraham Lunggana alias Lulung terkait kasus RAPBD pada tahun 2015, Sumber Waras, hingga PKL Tanah Abang. Bahasa-bahasa yang ditonjolkan Ahok kerap kali ditanggapi dengan santai oleh Ahok. Dari Hal tersebut tampaknya Ahok tidak menanggapi serius setiap perkataan Wakil Ketua DPR Tersebut Hal ini terucap langsung pada saat Ahok menanggapi perkataan lulung bahwa seharusnya Ahok pantas dijadikan tersangka RAPBD 2015 bahkan dirinya dianjurkan cek kesehatan jiwa:

“Saya memang agak sakit jiwa, Cuma pas diperiksa kesehatan jiwanya..Saya memang agak sakit jiwa, Cuma pas diperiksa lolos, pas gitu ukurannya. Sekarang ukurannya bukan tes kesehatan jiwa lagi. Harusnya mendagri bisa copot anggota dewan seperti itu. (Santosa,2015,h.189)

“Saya pikir Haji Lulung bukan sekolah Polisi ya, kalau dia sekolah Polisi saya akan usul kepada Pak Jokowi untuk menggantikan Pak Buas sebagai Kabareskrim, tapi sayang ga bisa, mohon maaf ya” (Metro TV,29 Juli 2015)

“Itu Sodara Lulung itu, dia harus belajar banyak hal lah, contohnya kalo punya Lamborgini itu bayar pajak, dia itu mungkin mau ditangkap KPK karena gratifikasi karena dia bilang dulu minjam itu lamborgininya” (Metro TV,17 Februari 2016)

Jika ditelaah, dilihat dari kalimat dan pilihan kata (diksi) yang digunakan Ahok kepada Lulung cukup frontal. Ahok menyindir Lulung yang berprofesi sebagai

pengacara namun tidak mengerti Hukum. Setiap kalimat yang ia lontarkan berupa pernyataan balasan skeptis terkait hal-hal yang menurutnya tidak benar. Bahasa-bahasa sarkas yang dilontarkan Ahok terkadang menohok dan mengharapakan orang lain yang mendengarnya membaca pikiran dan tujuan pembicarannya, meskipun tidak mengucapakan secara spesifiknya untuk itu tugas lawan bicaralah untuk mengetahui apa yang dimaksudnya.

5.2. Basuki Tjahaja Purnama dalam Studi Dramatisme

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat dominan seorang Basuki Tjahaja Purnama sebagai *agent* melalui dramatisme menempatkan pernak-pernik personal yang menyertai nilai motivasional seperti gagasan, keinginan, ketakutan, kedengkian, intuisi, imajinasi dan ekspresi personalitas lainnya. Melalui penjelasan Burke (West & Turner,2010,h.33) peneliti dapat melihat ciri-ciri yang dimiliki *agent* seperti ego, konsep diri, super ego, kesadaran, keinginan, objektif, pikiran, semangat dan ekspresi. *Agent* tidak hanya dipandang secara individual atau personal, tetapi dapat merupakan super person seperti ras, bangsa dan etnis misalnya (Suparno,2011,h.198).

Selain mengembangkan teori dramatisme, Burke juga menciptakan suatu metode untuk menerapkan teorinya terhadap sebuah pemahaman tentang aktivitas simbolik (West & Turner,2013,h.32-33). Metode tersebut adalah pentad, yang terdiri dari lima point antara lain *act* (apa yang sedang dilakukan), *scene* (dalam keadaan atau situasi apa tindakan dilakukan), *agent* (orang seperti apa yang melakukannya), *agency* (dengan cara apa ia melakukannya) dan *purpose* (untuk tujuan apa) (Weiser 2007, h.293). Dalam hal ini pentad berfungsi untuk menjelajah tata bahasa dari motif yang terus-menerus diciptakan melalui simbol oleh manusia (Rutten & Soetart, 2009,h.7). Sehingga pentad di maksudkan sebagai alat untuk menganalisa motif yang disajikan seseorang dalam wacana nya (Kneupper,1979,h.132).

Gambar 5.1 Basuki Tjahaja Purnama dalam Pentad Dramatisme

Sumber: Olahan Peneliti,2017

Tabel 5.2 Hasil Temuan Dramatisme

NO	Dasar Teori	Implikasi Penelitian	Hasil Temuan
1	Koehn (2010) <i>Ethical Eltism: A Burkean Analysis ogf the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush</i>	Dengan Analisis pentad mengungkapkan fokus retorika politik sekaligus motif dari penggunaan retorika yang dibangun seorang <i>political actor</i> .	Fokus retorika Ahok terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan Pemerintah yang bersih, transparan dan profesional.
2.	Schultz (2011) <i>A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse</i>	Dengan Analisis pentad mengungkapkan penebusan rasa bersalah.	Penebusan rasa bersalah Ahok tampak saat dirinya terlibat dalam kancah politik nasional berangkat dari rasa bersalah yang merasa miris melihat kondisi birokrasi pemerintah di Belitung Timur.
3	Suparno (2010) Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia.”	Dengan menggunakan teknik analisis pentad dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (<i>scene</i>) saling bersaing dan berkompetisi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan.	Melalui penelitian ini Dramatisme mengarahkan bahasa sebagai hal primer karena mengungkapkan ekspresi dari seseorang. Terlihat jelas saat Ahok menanggapi komentar balasan dari Lulung, gesture tubuh dan bahasa yang dilontarkan Ahok terdengar lebih spontan kepada lulung. Selain itu terlihat adanya benturan argumen dari kader Partai Gerindra yang menganggap Ahok sebagai ‘Kutu Loncat’ dan ‘Malin Kundang’ saat dirinya mendeklarasikan keluar dari keanggotaan Partai Gerindra.
4	Smudde & Courtright (2011) <i>A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation</i>	Melalui dramatisme menggunakan analisis pentad akan terlihat elemen <i>scapegoat</i> .	Melalui penemuan ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya kekonsistenan pada tindakan komunikasi politik Ahok melakukan penebusan menggunakan <i>scapegoat</i> kepada Lembaga Pemerintahan, Tatanan Kelola Pemerintahan DKI Jakarta, dan Media.

Sumber: Olahan Peneliti,2017

5.2.1. Fokus Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

Untuk itu Disertasi penelitian Koehn (2010) yang berjudul *Ethical Eltism: A Burkean Analysis of the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush* mendukung penelitian ini. Selain menggunakan pentad, artikel Koehn juga berada dalam studi pendekatan *political actor and rhetoric*. Penelitian tersebut menganalisis

pidato dan pernyataan yang disampaikan secara retorik Bush dalam masa jabatan pertamanya. Tujuannya untuk fokus melihat isu-isu moral dan etika yang coba dibangun Bush dalam setiap pidatonya. Hasilnya topik retorika yang digagas Bush terkait teror dan perang merupakan ancaman bagi keamanan global yang dialamatkan kepada negara Irak dan Afganistan bahwa Irak merupakan ancaman nuklir, nada yang sama juga ditekankan Bush saat memberikan pidato tentang Afganistan dia menjelaskan bahwa negara tersebut terdiri dari pemimpin korup yang menghancurkan orang-orang yang tinggal di Afganistan dan secara bersamaan menawarkan ancaman lanjutan ke AS. Dan isu-isu moral lain terkait menolak mengakui amandemen konstitusional pernikahan sesama jenis. Setiap pidatonya Bush sebagai *agent* memposisikan dirinya yang konservatif sebagai menjaga kehidupan manusia (*pro-life*) menolak pernikahan sesama jenis, secara tegas mendukung hukum yang melarang percobaan penelitian *embryonic stem cell* yang bertentangan dengan nilai-nilai kristiani ortodoks.

Implikasi dihasilkan oleh Koehn menunjukkan, penggunaan dramatisme serta analisis pentad dalam komunikasi politik terbukti bekerja dengan baik, sebagaimana hasil penelitian dari Koehn telah menunjukkan bahwa dramatisme telah mampu mengungkapkan bagaimana fokus retorika politik dari Ahok sekaligus motif dari penggunaan retorika tersebut. Sehingga hal ini sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menggunakan dramatisme serta analisis pentad.

Setelah melakukan analisis, peneliti dibantu menggunakan dramatisme untuk mengidentifikasi topik retorika Ahok, hasilnya adalah fokus retorika Ahok berdasarkan data adalah terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. Untuk mendukung itu Ahok perlu menampilkan dirinya sebagai sosok *rhetor* yang kredibel dan terpercaya. Agar komunikator dan komunikan memiliki persepsi yang sama terhadap isu yang disampaikan. Contohnya Ahok pernah dinobatkan sebagai “10 Tokoh Pilihan yang mengubah Indonesia” versi majalah Tempo (2006), peraih

pin emas pejuang demokrasi dari Forum Demokrasi (2006), dan penghargaan tokoh anti korupsi *Bung Hatta Anti Corruption Award* (2013).

5.2.2. Penebusan rasa bersalah

Jika dilihat kondisi politik Indonesia pada tahun 2004 itu terlihat bahwa tema-tema yang berkembang masih terkait tema legitimasi kekuasaan, marketing politik, *money-politic* hingga korupsi masih menjadi warna. Kekecewaan masyarakat atas hasil pemilu yang cukup berasal karena perilaku elit partai tidak menunjukkan contoh yang baik bagi khalayak (Firmanzah, 2010, h.91). Kesan bahwa politisi meninggalkan konstituennya dan hanya sibuk untuk kepentingan partainya atau kepentingan pribadinya semakin tampak. Parpol dicitrakan sebagai alat mencapai kekuasaan dan menumpuk kekayaan, sedangkan kekuasaan disalahgunakan untuk menangguk keuntungan dari masyarakat. Sehingga semakin jelas jarak antara pejabat selaku elit politik dan konstituennya semakin jauh.

Untuk itu Ahok sebagai *rhetor* berupaya memposisikan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) bukan hanya sebagai merekrut kader dan pendulang suara (*vote getter*) untuk keperluan kampanye. Namun pada masa itu ia dituntut untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk tidak apatis pada kondisi politik nasional. Pernyataan-pernyataan Ahok yang lugas, dan tegas dalam menangkis memberikan bantuan uang pada konstituen, menunjukkan terjadinya diskursus rasional di masyarakat. Salah satu senjata utama dalam argumentasi-argumentasi rasionalitas Ahok, melalui pernyataan-pernyataannya adalah keinginan mendudukkan kembali substansi masalah yang pada saat itu menjadi subyek perdebatan di dalam *mindset* masyarakat. Contohnya mengatakan:

“Goblok!Goblok!Goblok! Kalian mendukung partai saya tanpa peduli, bahkan tanpa mengetahui apa ideologi partai saya yang penting karena sudah banyak mendapatkan bantuan (Santosa, 2015, h.72)”

”Coba bayangkan harga baju kaos bola yang hanya Rp15.000,-, mereka telah rela memberikan nasib mereka dan anak cucu kepada partai saya. Bayangkan Rp15.000,- kalau dibagi 5 tahun/bulan mereka baru bisa

mendapatkan RP250 per bulan. Sedangkan saya bisa memperoleh sekian juta rupiah. Di tambah jika saya tidak memperjuangkan jaminan sosial untuk mereka di APBD, maka mereka akan “dirampok” oleh biaya kesehatan, pendidikan dan modal kerja (Purnama,2008,h.31).

Kesimpulan dramatik dari Basuki Tjahaja Purnama diatas menunjukkan dominannya element *agent* dan *scene* berpengaruh dalam tindakan komunikasinya. Keputusan Ahok bergabung dengan Partai PIB disebabkan oleh rasa tak puas karena hanya bertindak sebagai penonton dalam kancah politik. Namun salah satu asumsi dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol (West & Turner,2013,h28). Masyarakat pada saat itu menganggap menjadi pejabat pasti akan berujung melakukan korupsi sehingga banyak orang mulai mencibirnya bahwa ia terlalu ambisius, gila dan tak tahu diri.

Untuk memperkuat penelitian, peneliti menggunakan artikel Schultz (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse* yang juga sama-sama menggunakan pendekatan dramatisme. Beliau berusaha menjelaskan motif dari tindakan menggunakan kerangka interpretasi Kenneth Burke ditujukan kepada pelaku pelecehan seksual di Amerika. Melalui penelitian ini wacana *moral panics* dibangun sebagai tindakan pencegahan hasil ekspos oleh surat kabar, masyarakat, badan legislatif, dan LSM. Pelaku yang melakukan kejahatan seksual akan dihukum, direhabilitasi dan akan diberikan label “Predator seksual” yang disimbolisasikan sebagai monster jahat, tua, kotor, serigala berbulu domba.

Hasilnya simbolisasi seperti itu akan membuat pelanggar mengalami perasaan bersalah dan penyesalan, rasa malu menghasilkan tindakan isolasi terhadap orang lain karena dianggap sangat keji. Melalui perspektif Burke, membantu kita memahami paksaan di balik sifat ketertiban sosial, dan bagaimana sang aktor didorong untuk pengorbanan untuk

mencapai penebusan. Burke berfokus pada cara di mana mendesak untuk pemurnian. Pengalaman dari rasa malu membujuk aktor tersebut untuk meredakan kesalahannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Schulz memiliki kesamaan dengan peneliti menggunakan kajian pentad drama selain meneliti retorika serta motif dari tindakan bahwa pentad drama juga dapat mengungkapkan rasa bersalah dan penebusan atas masa lalu seseorang. Perbedaannya Schulz berorientasi pada pelaku pelecehan seksual pada anak-anak sedangkan objek penelitian yaitu seorang aktor politik Basuki Tjahaja Purnama. Adapun jika dilihat melalui studi dramatisme, keinginan besar Ahok masuk dalam kancah politik nasional berangkat dari rasa bersalah yang merasa miris melihat tatanan hierarki (kondisi) birokrasi pemerintah yang korup. Sebagai mantan pengusaha CV Panda, dirinya pernah bertikai dengan para pejabat yang meminta menanggung keuntungan bersama, namun ia dengan tegas menolak untuk menafkahi para pejabat nakal dan memilih untuk menutup pabrik. Untuk itu ia ingin melakukan penebusan rasa bersalahnya dengan menjadi pejabat publik untuk mematahkan stigma negatif:

“Saya ingin membuktikan, anggapan orang-orang bahwa pejabat pasti korup, pejabat tidak pernah benar-benar bekerja untuk rakyat, itu salah. Stigma itu mau saya lawan, boleh diuji!” ungkap Ahok (Santosa,2015,h.xi).

Bagi Burke, proses rasa bersalah dan penebusan mengamankan keseluruhan konsep simbolisasi. Rasa bersalah, adalah motif utama untuk semua aktivitas simbolik. Karena kita terus menerus, merasa bersalah, kita juga terus berusaha untuk memurnikan diri kita sendiri dari ketidaknyamanan rasa bersalah (West & Turner,2010,h.30). Proses rasa bersalah tersebut merupakan siklus awal bagi Ahok untuk masuk politik nasional.

5.2.3. **Pertarungan Wacana Ahok VS Lulung dan Partai Gerindra**

Dalam perkembangan situasi (*scene to scene*), adanya argumen-argumen sentral yang berkembang di sekitar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Wakil Ketua DPRD DKI

Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung. Ahok, sebagai aktor politik yang tidak segan-segan membalas komentar yang terlontar dari Lulung, begitu pun sebaliknya. Hampir setiap program yang disuguhkan Ahok akan kembali dikomentari oleh Haji Lulung.

Perdebatan awal Haji Lulung dan Ahok bermula saat Ahok menyebut kecurigaannya ada mark up anggaran pengadaan alat *Uninterruptible Power Supply (UPS)* terbukti menyusul penetapan oknum DPRD DKI Jakarta sebagai tersangka. Ucapan Ahok membuat panas telinga Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung dan kawan-kawannya. Saut-sautan bertambah panas ketika Lulung juga ikut angkat bicara dengan meminta Ahok berhati-hati dalam ucapannya.

Melalui Dramatisme mengarahkan bahasa sebagai hal primer karena mengungkapkan ekspresi dari seseorang. Terlihat jelas saat Ahok menanggapi komentar balasan dari Lulung, gesture tubuh dan bahasa yang dilontarkan Ahok terdengar lebih spontan kepada Lulung.

“Mohon dibantu juga kalau punya Lamborghini, pelat nomornya jangan bodong, biar bayar pajak. Jadi kalau kaya, terus punya Lamborghini, STNK-nya yang benar bayar pajak gitu lho. Bantu kita supaya pendapatan pajak kita nambah”(Tempo,13 Februari 2013)

Selain benturan argumen dengan Haji Lulung, peneliti juga menyajikan benturan Ahok dengan Partai Gerindra, merupakan partai pengusung Ahok menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 2014 silam. Melalui dramatik tersebut bahwa elemen *scene* dan *agent* adalah yang paling dominan dan berpengaruh dalam tindakan komunikasi serta motif dari sikap politik Ahok. Alur *scene* yang dimulai dari pilpres 2014 yang telah usai, namun kontestasi pilpres masih sangat terasa kental. Untuk itu tema-tema sentral pada saat itu yang berkembang seputar keterbelahan dua koalisi besar, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), perbedaan pandangan RUU Pilkada, dan dualisme kepemimpinan partai membuat kompas politik nasional berubah arah Koalisi Merah Putih

(Gerindra, Golkar PKS, PAN, PPP dan Demokrat) pengusung Prabowo-Hatta, mengadakan sidang paripurna untuk melakukan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Sikap yang diambil KMP dianggap politik balas dendam karena gagal “menduduki” Istana Negara. Sementara SBY dari Demokrat sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dinilai rakyat sebagai penghianat demokrasi karena dianggap tidak menepati janjinya untuk mendukung pilkada langsung.

Peran Ahok disini sebagai *agent* juga disoroti, karena tujuan dari dramatisme adalah untuk melihat motif dari tindakan komunikasinya. Sikap politik zig-zagnya terlihat saat dirinya tidak sepakat dengan rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Hal tersebut dianggapnya seperti membuka luka lama zaman rezim gaya Orde Baru. Dulu tekad Ahok masuk Gerindra, karena memiliki ideologi yang sama. Gerindra berani mencalonkan dirinya karena rekam jejaknya walaupun berasal dari kalangan minoritas. Sebagai tokoh yang idealis, Ahok menyakini posisi Cawagub DKI Jakarta merupakan batu loncatan strategis selain untuk menunjukkan integritas sebagai politikus juga memberikan tontonan kepada masyarakat bahwa pilkada langsung rakyat mendapatkan kesempatan untuk memilih kepala daerah yang bersih, transparan, dan profesional.

Namun surat pengunduran dirinya pada keanggotaan Gerindra sebagai jawaban atas sikap perbedaan pandangan politiknya terkait Rancangan Undang Undang Pilkada yang diusulkan kepala daerah akan langsung dipilih oleh DPRD. Sedangkan ahok berpandangan bahwa pilkada mesti dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pengunduran dirinya memancing sejumlah reaksi sebagian besar aktor politik mendefenisikan sikap ahok sebagai politikus kutu loncat dan pragmatis. Hal tersebut mengingatkan kembali bahwa sebelum dipinang Gerindra, Ahok juga melakukan loncatan dari Golkar yang menghantarkannya ke kursi DPR RI yang dijalaninya selama dua setengah tahun.

Tampaknya sikap politik Ahok berusaha disimbolisasikan aktor politik lain. Sesuai dengan asumsi dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengaku kecewa dan menilai Ahok sebagai politikus oportunistis yang tidak mengerti etika yang menganggap partai sebagai '*kutu loncat*'. Sedangkan M.Taufik, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta menantang kekonsistenan Ahok, untuk mundur dari jabatan gubernur karena partai Gerindra yang berjasa menghantarkannya untuk menjadi Wakil Gubernur pada 2014 silam (Tempo, September 2014). Ahok jadi bulan-bulanan kader Gerindra bahkan ia dinilai sebagai Malin Kundang, Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J.Mahesa, kecewa kalau Ahok mundur sebagai kader yang telah membesarkannya. Desmond mensimbolisasikan Partai Gerindra seperti Ibu yang membesarkan Ahok (Santosa,2015,h.269).

Selepas Ahok dari Gerindra, tawaran dari Hanura, PKB dan PDIP pun berkumandang di media cetak dan elektronik. Presiden terpilih Joko Widodo mengapresiasi langkah Ahok keluar dari Gerindra, "Menurut saya, itu sebuah keberanian sikap beliau. Harus dihargai, Pak Ahok pasti merasakan sendiri bahwa Pilkada langsung menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan demokratis."Selain memuji, Jokowi mengaku senang jika Ahok berlabuh di PDI Perjuangan. "Kalau benar, berarti saya dapat satu ya," kata Jokowi (Kuwado,2014). Tuduhan terhadap dirinya sebagai politikus oportunistis tersebut salah alamat. Ahok meyakini bahwa tradisi meloncat dari satu partai ke partai lain, dari satu jabatan ke jabatan lain, merupakan masalah ambisi, tetapi ambisi tersebut berguna bagi masyarakat luas dan manusia harus memiliki ambisi untuk bisa sukses.

Melalui dramatisme peneliti menghasilkan penemuan dari *scene* ini peneliti melihat adanya pertarungan wacana yang bersinggungan dengan Ahok. Jejak-jejak pesan yang mereka artikulaskan menjelaskan bagaimana satu isu dengan isu lain dapat bersinggungan, bertentangan, untuk menunjukkan bagaimana bahasa yang digunakan untuk melakukan

seleksi, refleksi, defleksi (pembelokan) terhadap realitas yang disesuaikan dengan kepentingan mereka (Suparno,2012,h.115).

Suparno (2010) melalui disertasinya mendemostrasikan penggunaan dramatisme mampu memunculkan unsur-unsur motif kontestasi antar aktor politik dengan judul penelitian “Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia.” Data yang digunakan Suparno ialah berupa penelusuran pernyataan-pernyataan surat kabar Kompas sepanjang tahun 1997 sampai 1998. Dengan menggunakan teknik analisis pentad dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (*scene*) saling bersaing dan berkompetisi terhadap makna Reformasi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan. Dalam konteks ini, tindakan aktor dapat memperlihatkan apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang sama atau apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Suparno di atas mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penggunaan bahasa dalam sebuah pernyataan, sikap serta tindakan komunikasi dari Basuki Tjahaja Purnama di berbagai *scene*, mengandung makna dan motif tertentu. Peneliti juga menyajikan pernyataan-pernyataan verbal aktor-aktor yang pro dan kontra dari berbagai perspektif berbeda yang saling bersaing sehingga menimbulkan *clash of argument*.

Perubahan sikap antiklimaks Basuki Tjahaja Purnama saat memilih meninggalkan partai Gerindra menimbulkan spekulasi liar yang menuntut jawaban pasti. Narasi yang dibawakan Basuki Tjahaja Purnama dalam hal ini dapat membuat *misleading* opini dari lawan politiknya. Inilah jejak-jejak komunikasi yang memperlihatkan ada persaingan komunikasi yang menggambarkan kepentingan dari tiap-tiap individu yang diusahakan. Pada satu sisi, pihak yang kontra dengan pengunduran Ahok dari Gerindra mensymbolisasikan

Ahok sebagai “kutu loncat”, penghianat partai, malin kundang, serta arogansi kekuasaan. Sedangkan pihak pro dengan Ahok, diartikulasikan sedemikian rupa melalui penggambaran sebuah idealisme, sesuai koridor konstitusi, nasionalisme tinggi dan agung, serta menjunjung nilai demokrasi. Didukung oleh narasi politiknya yang disampaikan di Metro TV (September,2014) bahwa dirinya hanya loyal kepada partai yang sesuai konstitusi.

Berdasarkan pada rasio dramatik di atas, hasilnya menunjukkan bahwa elemen *agent* dan *purpose* merupakan elemen yang paling dominan dan berpengaruh dalam tindakan retorik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Latar belakang Ahok sebagai eksekutif pemerintahan, ia merasa memang tindakan (*act*) yang dilakukannya sudah benar karena dirinya taat pada konstitusi bukanlah konstituen.

5.2.4. Pengkambing Hitam (*Scapegoat*)

Melalui analisis dramatisme penulis juga mendapat temuan bahwa adanya negativitas dalam situasi ini yakni adanya penolakan terhadap sesuatu dalam tatanan sosial (west & turner,2008,h.31). Pada awalnya penertiban kebijakan relokasi PKL pasti ada masyarakat yang pro dan kontra akan kehadiran kebijakan tersebut. Bagi pihak yang kontra dapat dikatakan dalam pola negativitas. Masyarakat yang berada dalam tatanan sosial yang sudah ada berusaha melindungi diri dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini dianggap berbeda dalam tatanan sosial yang terbentuk. Terlihat pada saat upaya penertiban PKL di Tanah Abang oleh Ahok menuai kecaman dari berbagai paguyuban.

Merujuk pada hasil akhir yang ada dalam benak *agent* dan tindakan. Tentu di dalamnya memiliki motif tersembunyi yang alurnya akan membentuk drama. *Guilt-Redemption Cycle* merupakan akar semua retorik. Burke yakin, bahwa motivasi terakhir dari semua aktor adalah untuk membersihkan diri kita dari *guilt* yang pernah di alami aktor. Dalam situasi ini, untuk mengadministrasi keadilan sosial Ahok sebagai eksekutor

pemerintah berusaha menunjukkan dirinya tunduk pada konstitusi bukan konstituen. Aktor politik meyakinkan khalayak melalui pernyataan-pernyataannya bahwa ada sesuatu yang salah dan harus diubah yang menimbulkan *guilt* dalam diri khalayak. Burke menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang perfeksionis. Manusia ingin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kemauannya (Safitri,2014,h.15). Dalam diri khalayak yang merasakan *guilt* ini, akan ada *perspective of incongruity* yaitu ketidaksesuaian atau sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Ini tentu menggali sikap perfeksionis manusia. Untuk menghilangkan perasaan ketidaksempurnaan ini, manusia berpikir harus ada pihak yang disalahkan atas *incongruity* ini. Karenanya, Burke menganggap retorik adalah pencarian khalayak akan kambing hitam (*scapegoat*) yang sempurna.

Untuk menghilangkan *guilt*, menurut Burke, aktor mempunyai dua pilihan, yakni menyalahkan diri sendiri (*mortification*) dan mencari *scapegoat*, faktor eksternal sebagai pihak yang bersalah untuk bertanggung jawab (West & Turner,2008,h.31). Dalam drama politik yang terjadi, penulis melihat kecenderungan Ahok mencari *scapegoat* berbanding lurus dengan elemen *purpose* yakni, Ahok meyakini bahwa kecaman (pihak yang kontra) tersebut hanya berasal dari orang-orang yang kepentingan terusik di sekitar Pasar Tanah Abang, seperti; penyewa lapak, dan praktek premanisme yang diduga banyak dilakukan pungli oleh penguasa Tanah Abang termasuk di-*backup* oleh berbagai kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Hal tersebut diperkuat oleh argumen Ahok, yang menyatakan:

“Kenapa yang suka ribut itu itu yang nyewain lapak, atas nama paguyuban, persatuan. Kamu kalo jual-jual lapak, *gue penjara lu!* Jadi sebenarnya penyewa lapaknya yang saya marahi bukan PKLnya”.
(Sumber Dokumentasi: Kick Andy, Kontroversi Ahok,2016)

“Saya taat konstitusi bukan konstituen, tapi Jakarta anda lakukan apa saja akan menyenggol orang karena begitu banyak kepentingan. Tapi coba pikirkan baik-baik pernah tidak dalam sejarah tanah abang blok tanah abang dibagikan secara gratis”
(Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

Jika penulis menghubungkan dengan artikel Smudde & Courtright (2011) *A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation*, dalam penelitiannya melakukan analisis menggunakan *pentad* terkait masalah sehari-hari dalam mengelolapara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dilakukan bagi seorang praktisi *Public Relation*. Dengan menggunakan analisis *pentad*, maka akan membantu praktisi *Public Relation* untuk melakukan analisis dan perencanaan, identifikasi, penciptaan, peningkatan hubungan dengan *stakeholder*. Di tingkat ini *hexad* mengungkap dimensi mikropis penting bagi *stakeholder*. Pada akhirnya kombinasi analisis teori dan kasus disintesis menjadi pendekatan prospektif terhadap manajemen pemangku kepentingan yang mungkin digunakan organisasi selama perencanaan strategis.

Smudde & Courtright mengisahkan *The Black Dog Tavern* di Martha's Vineyard merupakan perusahaan terbesar di pulau tersebut dan memiliki hubungan positif dengan pemangku kepentingan karyawan dan masyarakat sebelum tahun 2001. Namun seiring perganti kepemimpinan digantikan putra pendiri perusahaan tersebut. CEO baru tersebut melakukan berbagai kebijakan strategis baru yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Ia memotong separuh tenaga kerja, menghapuskan putaran pembayaran sepanjang tahun dan menutup kedai minum selama 3 bulan pada musim dingin berikutnya. Hasilnya mengakibatkan kemarahan masyarakat, beberapa orang berpikir sumber masalah berasal dari perubahan (*gulit*) yang dijadikan *scapegoat*. CEO baru tersebut menerima kesalahan tersebut namun membenarkannya dengan argumen transenden bahwa kesehatan keuangan perusahaan lebih penting (*redemption*). Meskipun kepercayaan kepuasaan lokal telah dilanggar, *The Black Dog Tavern* tetap menjadi penting bagi *stakeholders* (terutama turis dan pelanggan online yang menginginkan koleksi terbaru dan logo *The Black Dog Tavern*).

Implikasi artikel Smudde & Courtright dengan penelitian ini memiliki banyak segi kesamaan. Namun penulis berfokus pada retorika seorang aktor politik. Pada scene ini PKL

Tanah Abang sebelumnya tidak pernah terusik pada pemerintahan Fauzi Wibowo-Prijanto, namun pada saat masa pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama memberikan dampak pada pembenahan birokrasi dan perubahan iklim komunikasi Pemprov DKI terkait eksekusi penertiban PKL Pasar Tanah Abang. Perubahan pada pemerintahan Ahok dianggap tidak mengedepankan dialog dengan tokoh masyarakat dan mengkritik gaya komunikasi Ahok yang dinilai *low context* untuk masyarakat di Jakarta. Mayoritas masyarakatnya Jawa dan Betawi, seringkali ucapan Ahok menjadi persoalan. Sementara masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat Asia umumnya, berbudaya konteks tinggi (Mulyana, dikutip dari Edward T.Hall 1966,1976).Hal tersebut dibuktikan ketika para pengunjung rasa RAJJAM AHOK (Rakyat Jakarta Jahit Mulut Ahok) yang berasal dari paguyuban Betawi Bersatu mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, memperkarakan bicara Ahok yang selama ini keras, khususnya tudingan tentang oknum DPRD dan preman-preman yang mem-backing PKL Pasar Tanah Abang.

Scene di atas memperlihatkan bahwa Ahok yang dijadikan *scapegoat* untuk menebus perubahan pada iklim komunikasi Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, Ahok adalah aktor utama yang diposisikan sebagai akar dari permasalahan sehingga ia dipersalahkan, dan dihujat para pengunjung rasa tersebut. Menurut Suparno (2012,h.197) pengorbanan merupakan gambaran bagaimana seseorang melakukan perlawanan melalui sinisme terhadap kondisi yang dihadapinya. Sedangkan Ahok menyakini Pemprov DKI sudah melakukan sosialisasi sebelum eksekusi kebijakan relokasi penertiban PKL Pasar Tanah Abang. Sama halnya dengan salah satu asumsi teori dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Ahok mengetahui persis bahwa kentalnya praktik premanisme dengan aksi sewa lapak yang mahal di Tanah Abang dan keinginan para PKL berjualan dipinggir jalan merugikan rakyat menengah kebawah dan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum (*scapegoat*). Untuk itu sebagian masyarakat juga memaknai bahwa tindakan

Ahok memberikan rasa keadilan dengan mengembalikan fasilitas umum pada fungsinya melalui penegakan Perda Ketertiban Umum sudah tugasnya sebagai eksekutor kebijakan. Ahok juga menyiratkan dengan kata-kata bahwa tindakannya tersebut didukung oleh masyarakat khususnya Jokowi, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu.

“Kami lagi bangun pasar, retribusi harian, tidak disewakan, tapi anda tidka boleh curang, cucu anda tidak boleh dapat warisan kalau tidak Jakarta ini dikuasai orang kaya semua. Saya mengerti sekali semua PKL itu pengen di pinggir jalan.” Kata Ahok dengan tenang

(Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

“Beliau (Jokowi) instruksikan pada saya penyebab macet adalah PKL ini. Semua sudah tahu kan, tinggal eksekusi. Nah, itu apa persoalannya? Tinggal kamu punya nyali nggak? Karena kamu akan menyenggol oknum pedagang sama oknum Konglomerat, ya”

(Detik.com, Agustus 2013)

Melalui penemuan ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya kekonsistenan pada tindakan komunikasi politik Ahok melakukan penebusan menggunakan *scapegoat* :

5.1.1 Hasil Temuan *Scapegoat*

NO	Tatanan kelola pemerintahan DKI Jakarta	Lembaga Negara	Media
1	Pada <i>scene</i> Ahok bersitengang dengan Badan Pengawas Keuangan DKI Jakarta (BPK) terkait kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, pada <i>scene</i> tersebut Ahok mengkritik (<i>purpose</i>) agar BPK memperbaiki kinerja, kecermatan, objektif dalam evaluasi proses audit anggaran serta independen tanpa mudah ditunggangi oleh kepentingan politis karena menurutnya banyak oknum-oknum yang	Pada saat Ahok menjabat menjadi anggota DPR RI Komisi II, Ahok aktif memberikan kritik dan argumen kontroversial tentang mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kritik Ahok ditujukan kepada Bawaslu dan KPU untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan terobosan upaya menghindari	Pada <i>scene</i> Ahok melontarkan pernyataan bahwa berita yang ditayangkan TV ONE menyatakan banyak sekali fitnah dan pemberitaan yang dianggap tidak logis kontennya tidak <i>fair</i> dan menggiring opini untuk menjatuhkan citra Pemprov DKI.

	berlindung dibawah naungan pemerintah.	kecurangan dalam pemungutan suara, dan menciptakan iklim perpolitikan yang kondusif di mana individu-individu yang idealis dan bersih, transparan dan profesional serta mampu bersaing secara sehat	
2.	Pada <i>scene</i> sengketa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Ahok menegaskan praktek gelap memainkan anggaran masi terus terjadi. Ahok mengkritik keras anggota DPRD yang tidak suportif dalam upaya mewujudkan Bersih, Transparan, dan Profesional dalam roda pemerintahan Indonesia khususnya melalui pengelolaan anggaran daerah yang dilakukan menggunakan sistem <i>e-budgeting</i> .		
3	Pada <i>scene</i> Ahok mengkritik Komnas HAM dan warga yang menghambat relokasi Kalijodo, pada <i>scene</i> tersebut Ahok memberikan penekanan (<i>purpose</i>) agar Komnas HAM melakukan langkah yang harmonis dan sinergis dengan Pemprov DKI dalam menegakkan Perda untuk mengembalikan hak-hak negara sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) atas tanah ilegal yang dibuat warga menjadi pemukiman dan kawasan prostitusi yang sudah mengakar di		

PEMBAHASAN DAN DISKUSI PENELITIAN

5.1. Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama sebagai *political actor*

Pembahasan yang akan dianalisis peneliti yaitu berdasarkan data temuan penelitian terkait Retorika politik Basuki Tjahaja Purnama. Retorika politik bisa dipahami sebagai salah satu strategi persuasi untuk meyakinkan orang lain. Dalam konteks komunikasi politik, banyak orang yang menyamakan retorika dengan propaganda. Zamawi dan Johnston membedakan keduanya secara gamblang:

A Useful distinction to make at this point is between the persuasion of rhetoric, which seeks to find compelling arguments to convince people, and the coercion of propaganda, which insist people believe certain thing or act in certain way by using communication techniques to end discussion (Johnston dan Zawawi,2000,h.282)

Retorika mengedepankan argumentasi-argumentasi sedangkan propaganda lebih mirip paksaan, tak memberikan ruang bagi publik untuk berpikir dan berwacana. Finnemore mengatakan (Jackson & Krebs,2007,h.6) mekanismenya *political actor* berusaha mengembangkan pemahaman bersama dan dapat dikatakan sebagai persuasi untuk mencapai “klaim normatif.” Sasarannya untuk menginternalisasi keyakinan baru dan akibatnya mengadopsi identitas dan referensi baru. Tindakan *agent* menjadi struktur sosial, gagasan menjadi norma, dan subjektif menjadi intersubjektif.

Nimmo (2011,h.30) mengatakan perlunya para komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka di dalam masyarakat harus ditetapkan, yaitu Politisi (wakil dan ideolog), komunikator profesional (promotor dan jurnalis) dan aktivis (juru bicara dan pemuka pendapat). Dalam penelitian ini klasifikasi Basuki Tjahaja Purnama termasuk dalam komunikator politik kategori politisi ideolog karena ia merupakan produk dari proses

kaderisasi, meniti karir politik dimulai menjadi ketua Dewan Perwakilan Cabang PPIB (Partai Perhimpunan Indonesia Baru) Kabupaten Belitung Timur.

Hasil analisis data yang telah dikemukakan pada Bab IV sebelumnya dihubungkan dengan konsep-konsep yang dikemukakan pada Bab II merupakan dasar untuk pembahasan sesuai dengan tujuan akhir penelitian yang berjudul **“Studi Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* Tokoh Basuki Tjahaja Purnama Dalam Perspektif Dramatisme”**.

Tabel 5.1 Hasil Temuan Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

NO	Dasar Teori	Implikasi Penelitian	Hasil Temuan
1.	Atwater (2007) <i>Senator Barack Obama The Rhetoric of Hope and The American Dream</i>	Pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkapkan retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak sehingga menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat.	Kekhasan retorika Ahok terletak pada penggunaan bahasanya sebagai <i>style</i> yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan <i>powerful</i> . Contohnya penggunaan metafora, “rampok”, “maling”, “begal”, dalam sengketa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
2	Robert Ivie (2009) <i>The Complete Critism of Political Rhetoric</i>	Retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefenisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan manipulasi simbol politik.	Ahok mengartikulasikan bahasa-bahasanya, bahwa seorang pemimpin jabatan publik bukanlah pemimpin perusahaan, sudah seharusnya wajib berjuang untuk melayani kepentingan rakyat dan mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya.
3	Martin (2004) <i>Balancing on the political high wire The role of Humor in the rhetoric of Ann Richards</i>	Pemilihan kata-kata dan gaya berpidato pada humor dalam politik digunakan seorang <i>political actor</i> sebagai taktik untuk negosiasi dan reorganisasi.	Pada gaya bahasa Ahok menggunakan humor sebagai sarana mengidentifikasi khalayaknya untuk menyalurkan kritik atau <i>uneg-uneg</i> . Contohnya sikap Ahok mengkritik Wakil Ketua DPRD, Lulung dengan memberikan sindiran-sindiran yang dibalut bahasa sarkas di media.

Sumber: Olahan Peneliti,2017

5.1.1. Kekhasan Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

Atwater (2007) dalam jurnal penelitiannya *Senator Barack Obama The Rhetoric of Hope and The American Dream* mengeksplorasi retorika yang digunakan oleh senator Obama yang dikenal sebagai ahli pengelolaan kesan lewat dialognya yang merupakan *persuasion campaign* untuk mendapatkan simpati dan dukungan massa memilih Obama sebagai Presiden Kulit Hitam pertama di Amerika dengan menyentuh emosional warga Amerika melalui “*Politic of Hope*” menggunakan retorika tentang kisah hidup dan masa lalunya. Pidato Obama yang telah dikemas dalam bahasa yang mengandung wacana tertentu dengan memproyeksikan visi kesatuan politik untuk memikat hati warga Amerika yang mendengarkan.

Penelitian Atwater diatas telah mendukung serta memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menggunakan kajian komunikasi politik, *genre actor and rhetoric*. Atwater menunjukkan pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkap retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak. Kuatnya pesan yang disampaikan aktor sehingga hal tersebut menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat.

Implikasi dari penelitian Atwater terkait studi *political actor and rhetoric*, peneliti membahas Basuki Tjahaja Purnama menemukan kekhasan retorika Ahok terletak pada penggunaan bahasanya sebagai *style* yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan *powerful* sebagai bentuk strategi retorika dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat umum. Contohnya, penggunaan metafora, tampak ketika Ahok menyebut “rampok”, “maling”, “begal”, dalam sengketa ‘dana siluman’ RAPBD 2015

(Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta. Aristoteles (West & Turner, 2007, h. 346) menyarankan penggunaan metafora untuk membantu *audience* memahami hal-hal yang kurang jelas sehingga lebih mudah dipahami.

5.1.2. Artikulasi Bahasa Seorang Pejabat Publik

Robert Ivie (2009) dalam jurnal penelitiannya *The Complete Criticism of Political Rhetoric* melakukan penelitian terkait pidato Presiden Ronald Reagan yang disebut sebagai *the great communicator*. Dikarenakan ia mampu berkomunikasi dengan lawan maupun kawan politiknya dengan gayanya yang khas selebriti, Reagan sadar betul bagaimana peranan TV sebagai media sangat besar pengaruhnya. Reagan sangat piawai dalam berpidato, kata-katanya singkat namun tajam, Reagan mengkomunikasikan “sentimen bukan gagasan.” Keahliannya menguasai panggung politik dengan penggunaan pementasan, waktu dan bakat pribadi, serta kemampuannya mengimbangi masalah politik yang diciptakan oleh kata-katanya sendiri. Bahasa Reagan mampu menunjukkan bahwa “ia milik rakyat” merupakan pelayan yang melayani rakyat. Sementara bahasa non-verbal seperti gerak tubuh, senyum, intonasi suara, merupakan bagian dari kesan emosional yang diperlukan.

Artikel ini juga menjelaskan bahwa retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefinisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan manipulasi simbol politik. Kerusakan sosial diakibatkan oleh komunikasi politik yang buruk karena gagal mengartikulasikan kebutuhan sosial dan mentransmisikan nilai-nilai politik tersebut.

Hasil penelitian milik Ivie memiliki perbedaan dengan penelitian ini, Reagan ditampilkan sebagai aktor politik yang pandai membangun kesan baik di media. Memungkinkan Reagan yang memiliki agenda berlawanan namun tanpa terdengar seperti pemberontak sedangkan Ahok merupakan figur yang blak-blak-an, berintonasi tinggi bahkan

cenderung kasar dapat menimbulkan konfrontasi langsung. Hal ini tampak saat dirinya sedang berhadapan dengan Haji Lulung. Ahok kerap kali. Ia dengan lugas.

Kesamaan dari objek penelitian bahwa Ahok juga kerap kali mengartikulasikan bahasa-bahasanya, bahwa seorang pemimpin jabatan publik bukanlah pemimpin perusahaan, sudah seharusnya wajib berjuang untuk melayani kepentingan rakyat dan mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya yang merupakan implementasi dari bulir-bulir pancasila.

"Kalau dulu saya liat orang miskin tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, saya pakai dompet saya. Saya pergi melayani orang dengan mobil saya. Ketika saya jadi pejabat, saya tidak pernah tahu apa itu uang bensin. Uang rakyat yang membayari saya. Saya hanya mendistribusikan uang itu kepada rakyat, jadi saya untung. Saya untung menolong orang dengan uang rakyat itu sendiri. Jadi, kalau rakyat memiliki pejabat yang mau menjadi penolong, jadi pelayan mereka, maka saya kira kita tidak akan mungkin melakukan korupsi." (Gunawan, 2013, h.111)

5.1.3. Gaya Bahasa Basuki Tjahaja Purnama

Martin (2004) dalam penelitiannya *Balancing on the political high wire the role of Humor in the rhetoric of Ann Richards* ini melakukan pemeriksaan retorika dari karir politik mantan Gubernur Texas Ann Richards yang mengungkapkan peranan penting retorika humor dalam strategi komunikasi politik perempuan. Richards menggunakan humor agar berhasil bernegosiasi peran pada sesuatu yang saling bertentangan atau menghambat, termasuk partai politik luar nasional terhadap Texas dan wanita terhadap politisi. Richards juga menggunakan humor sebagai taktik untuk negosiasi dan reorganisasi keunggulan dan subordinasi harapan gender dalam kehidupan publik.

Mengingat kasus Ann Richards tersebut, artikel ini membahas kendala dan peluang faktor sosial politik dan budaya daerah terhadap retorika politik perempuan. Akhirnya, analisis isi dan gaya berpidato politik Richards mengembangkan pemahaman tentang

bagaimana fungsi humor sebagai retorika dalam bernegosiasi. Hal ini juga menunjukkan salah satu cara wanita untuk dapat menantang gender yang telah dianggap marginal dalam dunia politik.

Hasil penelitian yang telah dilakukan Martin, mengatakan Humor dalam situasi sosial dapat dijadikan untuk mengidentifikasi khalayak. Humor dalam situasi politik merupakan strategi untuk meningkatkan popularitas. Komunikator dapat melakukan persuasi dengan efektif, karena hal ini telah direncanakan dan disiapkan dengan matang. Hal ini merupakan pembelajaran bagi semua orang, bahwa retorika itu seni bagaimana seseorang dapat menyampaikan secara efektif serta persuasif dan humor pun dapat digunakan sebagai senjata untuk mencapai tujuan tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Ann Richards.

Penelitian diatas dapat dikaitkan dengan gaya bahasa aktor politik Basuki Tjahaja Purnama berasal dari suku minoritas, menjadi gubernur bagi mayoritas masyarakat Betawi dan muslim di DKI Jakarta. Sikap dirinya sebagai oposisi dan pengkritik DPRD kerap kali memberikan sindiran-sindiran yang lugas dan langsung saat di undang dalam acara *Stand Up Comedy* pada Mei 2015 lalu. Dalam tesis sekaligus disertasi karya dari Wilson (2008) berjudul "*Was That Supposed to be Funny? A rhetorical Analysis of Politics, Problem, and Contradiction Stand-up Comedy*". Wilson meneliti mengenai kemungkinan humor atau lawakan sebagai bentuk aktivitas politik, ia tertarik pada efektivitas humor dalam politik, terutama saat ini, dimana dengan adanya *stand-up comedy* yang dapat dengan bebas dinikmati masyarakat dan tersebar luas melalui media massa. Tentu sebagai *rhetor* ahok yang dikenal tegas, dan berbicara lugas ia memiliki kesempatan untuk mengambil panggung *stand up comedy* untuk menyelipkan pesan politik melalui gaya bahasanya yang sarkas sebagai strategi komunikasinya kepada lawan politiknya.

Humor yang mengandung bahasa-bahasa sarkas yang digunakan Ahok sebagai sarana mengidentifikasi khalayaknya untuk menyalurkan kritik atau *uneg-uneg*. Sama halnya seperti yang dikatakan James Danandjaya (dalam Rahmanadji,2007, h.7) fungsi humor yang paling menonjol, yaitu sebagai sarana penyalur perasaan yang menekan diri seseorang. Perasaan itu bisa disebabkan oleh macam-macam hal, seperti ketidakadilan sosial, persaingan politik, ekonomi, suku bangsa, atau golongan. Tanpa dibalut kalimat yang berputar-putar. Masih terkait anggaran siluman, Ahok menyindir oknum DPRD DKI secara objektif yang mengusulkan pembelian *uninterruptible power supply* (UPS) kerap menjadi topiknya dalam komunikasi kepada lawan politiknya menimbulkan kesan agresif namun mengandung humor.

Tampilan bahasa humor diungkapkan Ahok ditonjolkan pada saat menanggapi-menanggapi pernyataan Haji Abraham Lunggana alias Lulung terkait kasus RAPBD pada tahun 2015, Sumber Waras, hingga PKL Tanah Abang. Bahasa-bahasa yang ditonjolkan Ahok kerap kali ditanggapi dengan santai oleh Ahok. Dari Hal tersebut tampaknya Ahok tidak menanggapi serius setiap perkataan Wakil Ketua DPR Tersebut Hal ini terucap langsung pada saat Ahok menanggapi perkataan lulung bahwa seharusnya Ahok pantas dijadikan tersangka RAPBD 2015 bahkan dirinya dianjurkan cek kesehatan jiwa:

“Saya memang agak sakit jiwa, Cuma pas diperiksa kesehatan jiwanya..Saya memang agak sakit jiwa, Cuma pas diperiksa lolos, pas gitu ukurannya. Sekarang ukurannya bukan tes kesehatan jiwa lagi. Harusnya mendagri bisa copot anggota dewan seperti itu. (Santosa,2015,h.189)

“Saya pikir Haji Lulung bukan sekolah Polisi ya, kalau dia sekolah Polisi saya akan usul kepada Pak Jokowi untuk menggantikan Pak Buas sebagai Kabareskrim, tapi sayang ga bisa, mohon maaf ya” (Metro TV,29 Juli 2015)

“Itu Sodara Lulung itu, dia harus belajar banyak hal lah, contohnya kalo punya Lamborgini itu bayar pajak, dia itu mungkin mau ditangkap KPK karena gratifikasi karena dia bilang dulu minjam itu lamborgininya” (Metro TV,17 Februari 2016)

Jika ditelaah, dilihat dari kalimat dan pilihan kata (diksi) yang digunakan Ahok kepada Lulung cukup frontal. Ahok menyindir Lulung yang berprofesi sebagai

pengacara namun tidak mengerti Hukum. Setiap kalimat yang ia lontarkan berupa pernyataan balasan skeptis terkait hal-hal yang menurutnya tidak benar. Bahasa-bahasa sarkas yang dilontarkan Ahok terkadang menohok dan mengharapakan orang lain yang mendengarnya membaca pikiran dan tujuan pembicarannya, meskipun tidak mengucapakan secara spesifiknya untuk itu tugas lawan bicaralah untuk mengetahui apa yang dimaksudnya.

5.2. Basuki Tjahaja Purnama dalam Studi Dramatisme

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat dominan seorang Basuki Tjahaja Purnama sebagai *agent* melalui dramatisme menempatkan pernak-pernik personal yang menyertai nilai motivasional seperti gagasan, keinginan, ketakutan, kedengkian, intuisi, imajinasi dan ekspresi personalitas lainnya. Melalui penjelasan Burke (West & Turner,2010,h.33) peneliti dapat melihat ciri-ciri yang dimiliki *agent* seperti ego, konsep diri, super ego, kesadaran, keinginan, objektif, pikiran, semangat dan ekspresi. *Agent* tidak hanya dipandang secara individual atau personal, tetapi dapat merupakan super person seperti ras, bangsa dan etnis misalnya (Suparno,2011,h.198).

Selain mengembangkan teori dramatisme, Burke juga menciptakan suatu metode untuk menerapkan teorinya terhadap sebuah pemahaman tentang aktivitas simbolik (West & Turner,2013,h.32-33). Metode tersebut adalah pentad, yang terdiri dari lima point antara lain *act* (apa yang sedang dilakukan), *scene* (dalam keadaan atau situasi apa tindakan dilakukan), *agent* (orang seperti apa yang melakukannya), *agency* (dengan cara apa ia melakukannya) dan *purpose* (untuk tujuan apa) (Weiser 2007, h.293). Dalam hal ini pentad berfungsi untuk menjelajah tata bahasa dari motif yang terus-menerus diciptakan melalui simbol oleh manusia (Rutten & Soetart, 2009,h.7). Sehingga pentad di maksudkan sebagai alat untuk menganalisa motif yang disajikan seseorang dalam wacana nya (Kneupper,1979,h.132).

Gambar 5.1 Basuki Tjahaja Purnama dalam Pentad Dramatisme

Sumber: Olahan Peneliti,2017

Tabel 5.2 Hasil Temuan Dramatisme

NO	Dasar Teori	Implikasi Penelitian	Hasil Temuan
1	Koehn (2010) <i>Ethical Eltism: A Burkean Analysis ogf the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush</i>	Dengan Analisis pentad mengungkapkan fokus retorika politik sekaligus motif dari penggunaan retorika yang dibangun seorang <i>political actor</i> .	Fokus retorika Ahok terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan Pemerintah yang bersih, transparan dan profesional.
2.	Schultz (2011) <i>A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse</i>	Dengan Analisis pentad mengungkapkan penebusan rasa bersalah.	Penebusan rasa bersalah Ahok tampak saat dirinya terlibat dalam kancah politik nasional berangkat dari rasa bersalah yang merasa miris melihat kondisi birokrasi pemerintah di Belitung Timur.
3	Suparno (2010) Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia.”	Dengan menggunakan teknik analisis pentad dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (<i>scene</i>) saling bersaing dan berkompetisi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan.	Melalui penelitian ini Dramatisme mengarahkan bahasa sebagai hal primer karena mengungkapkan ekspresi dari seseorang. Terlihat jelas saat Ahok menanggapi komentar balasan dari Lulung, gesture tubuh dan bahasa yang dilontarkan Ahok terdengar lebih spontan kepada lulung. Selain itu terlihat adanya benturan argumen dari kader Partai Gerindra yang menganggap Ahok sebagai ‘Kutu Loncat’ dan ‘Malin Kundang’ saat dirinya mendeklarasikan keluar dari keanggotaan Partai Gerindra.
4	Smudde & Courtright (2011) <i>A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation</i>	Melalui dramatisme menggunakan analisis pentad akan terlihat elemen <i>scapegoat</i> .	Melalui penemuan ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya kekonsistenan pada tindakan komunikasi politik Ahok melakukan penebusan menggunakan <i>scapegoat</i> kepada Lembaga Pemerintahan, Tatanan Kelola Pemerintahan DKI Jakarta, dan Media.

Sumber: Olahan Peneliti,2017

5.2.1. Fokus Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

Untuk itu Disertasi penelitian Koehn (2010) yang berjudul *Ethical Eltism: A Burkean Analysis of the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush* mendukung penelitian ini. Selain menggunakan pentad, artikel Koehn juga berada dalam studi pendekatan *political actor and rhetoric*. Penelitian tersebut menganalisis

pidato dan pernyataan yang disampaikan secara retorik Bush dalam masa jabatan pertamanya. Tujuannya untuk fokus melihat isu-isu moral dan etika yang coba dibangun Bush dalam setiap pidatonya. Hasilnya topik retorika yang digagas Bush terkait teror dan perang merupakan ancaman bagi keamanan global yang dialamatkan kepada negara Irak dan Afganistan bahwa Irak merupakan ancaman nuklir, nada yang sama juga ditekankan Bush saat memberikan pidato tentang Afganistan dia menjelaskan bahwa negara tersebut terdiri dari pemimpin korup yang menghancurkan orang-orang yang tinggal di Afganistan dan secara bersamaan menawarkan ancaman lanjutan ke AS. Dan isu-isu moral lain terkait menolak mengakui amandemen konstitusional pernikahan sesama jenis. Setiap pidatonya Bush sebagai *agent* memposisikan dirinya yang konservatif sebagai menjaga kehidupan manusia (*pro-life*) menolak pernikahan sesama jenis, secara tegas mendukung hukum yang melarang percobaan penelitian *embryonic stem cell* yang bertentangan dengan nilai-nilai kristiani ortodoks.

Implikasi dihasilkan oleh Koehn menunjukkan, penggunaan dramatisme serta analisis pentad dalam komunikasi politik terbukti bekerja dengan baik, sebagaimana hasil penelitian dari Koehn telah menunjukkan bahwa dramatisme telah mampu mengungkapkan bagaimana fokus retorika politik dari Ahok sekaligus motif dari penggunaan retorika tersebut. Sehingga hal ini sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menggunakan dramatisme serta analisis pentad.

Setelah melakukan analisis, peneliti dibantu menggunakan dramatisme untuk mengidentifikasi topik retorika Ahok, hasilnya adalah fokus retorika Ahok berdasarkan data adalah terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. Untuk mendukung itu Ahok perlu menampilkan dirinya sebagai sosok *rhetor* yang kredibel dan terpercaya. Agar komunikator dan komunikan memiliki persepsi yang sama terhadap isu yang disampaikan. Contohnya Ahok pernah dinobatkan sebagai “10 Tokoh Pilihan yang mengubah Indonesia” versi majalah Tempo (2006), peraih

pin emas pejuang demokrasi dari Forum Demokrasi (2006), dan penghargaan tokoh anti korupsi *Bung Hatta Anti Corruption Award* (2013).

5.2.2. Penebusan rasa bersalah

Jika dilihat kondisi politik Indonesia pada tahun 2004 itu terlihat bahwa tema-tema yang berkembang masih terkait tema legitimasi kekuasaan, marketing politik, *money-politic* hingga korupsi masih menjadi warna. Kekecewaan masyarakat atas hasil pemilu yang cukup berasal karena perilaku elit partai tidak menunjukkan contoh yang baik bagi khalayak (Firmanzah, 2010, h.91). Kesan bahwa politisi meninggalkan konstituennya dan hanya sibuk untuk kepentingan partainya atau kepentingan pribadinya semakin tampak. Parpol dicitrakan sebagai alat mencapai kekuasaan dan menumpuk kekayaan, sedangkan kekuasaan disalahgunakan untuk menangguk keuntungan dari masyarakat. Sehingga semakin jelas jarak antara pejabat selaku elit politik dan konstituennya semakin jauh.

Untuk itu Ahok sebagai *rhetor* berupaya memposisikan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) bukan hanya sebagai merekrut kader dan pendulang suara (*vote getter*) untuk keperluan kampanye. Namun pada masa itu ia dituntut untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk tidak apatis pada kondisi politik nasional. Pernyataan-pernyataan Ahok yang lugas, dan tegas dalam menangkis memberikan bantuan uang pada konstituen, menunjukkan terjadinya diskursus rasional di masyarakat. Salah satu senjata utama dalam argumentasi-argumentasi rasionalitas Ahok, melalui pernyataan-pernyataannya adalah keinginan mendudukan kembali substansi masalah yang pada saat itu menjadi subyek perdebatan di dalam *mindset* masyarakat. Contohnya mengatakan:

“Goblok!Goblok!Goblok! Kalian mendukung partai saya tanpa peduli, bahkan tanpa mengetahui apa ideologi partai saya yang penting karena sudah banyak mendapatkan bantuan (Santosa, 2015, h.72)”

”Coba bayangkan harga baju kaos bola yang hanya Rp15.000,-, mereka telah rela memberikan nasib mereka dan anak cucu kepada partai saya. Bayangkan Rp15.000,- kalau dibagi 5 tahun/bulan mereka baru bisa

mendapatkan RP250 per bulan. Sedangkan saya bisa memperoleh sekian juta rupiah. Di tambah jika saya tidak memperjuangkan jaminan sosial untuk mereka di APBD, maka mereka akan “dirampok” oleh biaya kesehatan, pendidikan dan modal kerja (Purnama,2008,h.31).

Kesimpulan dramatik dari Basuki Tjahaja Purnama diatas menunjukkan dominannya element *agent* dan *scene* berpengaruh dalam tindakan komunikasinya. Keputusan Ahok bergabung dengan Partai PIB disebabkan oleh rasa tak puas karena hanya bertindak sebagai penonton dalam kancah politik. Namun salah satu asumsi dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol (West & Turner,2013,h28). Masyarakat pada saat itu menganggap menjadi pejabat pasti akan berujung melakukan korupsi sehingga banyak orang mulai mencibirnya bahwa ia terlalu ambisius, gila dan tak tahu diri.

Untuk memperkuat penelitian, peneliti menggunakan artikel Schultz (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse* yang juga sama-sama menggunakan pendekatan dramatisme. Beliau berusaha menjelaskan motif dari tindakan menggunakan kerangka interpretasi Kenneth Burke ditujukan kepada pelaku pelecehan seksual di Amerika. Melalui penelitian ini wacana *moral panics* dibangun sebagai tindakan pencegahan hasil ekspos oleh surat kabar, masyarakat, badan legislatif, dan LSM. Pelaku yang melakukan kejahatan seksual akan dihukum, direhabilitasi dan akan diberikan label “Predator seksual” yang disimbolisasikan sebagai monster jahat, tua, kotor, serigala berbulu domba.

Hasilnya simbolisasi seperti itu akan membuat pelanggar mengalami perasaan bersalah dan penyesalan, rasa malu menghasilkan tindakan isolasi terhadap orang lain karena dianggap sangat keji. Melalui perspektif Burke, membantu kita memahami paksaan di balik sifat ketertiban sosial, dan bagaimana sang aktor didorong untuk pengorbanan untuk

mencapai penebusan. Burke berfokus pada cara di mana mendesak untuk pemurnian. Pengalaman dari rasa malu membujuk aktor tersebut untuk meredakan kesalahannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Schulz memiliki kesamaan dengan peneliti menggunakan kajian pentad drama selain meneliti retorika serta motif dari tindakan bahwa pentad drama juga dapat mengungkapkan rasa bersalah dan penebusan atas masa lalu seseorang. Perbedaannya Schulz berorientasi pada pelaku pelecehan seksual pada anak-anak sedangkan objek penelitian yaitu seorang aktor politik Basuki Tjahaja Purnama. Adapun jika dilihat melalui studi dramatisme, keinginan besar Ahok masuk dalam kancah politik nasional berangkat dari rasa bersalah yang merasa miris melihat tatanan hierarki (kondisi) birokrasi pemerintah yang korup. Sebagai mantan pengusaha CV Panda, dirinya pernah bertikai dengan para pejabat yang meminta menanggung keuntungan bersama, namun ia dengan tegas menolak untuk menafkahi para pejabat nakal dan memilih untuk menutup pabrik. Untuk itu ia ingin melakukan penebusan rasa bersalahnya dengan menjadi pejabat publik untuk mematahkan stigma negatif:

“Saya ingin membuktikan, anggapan orang-orang bahwa pejabat pasti korup, pejabat tidak pernah benar-benar bekerja untuk rakyat, itu salah. Stigma itu mau saya lawan, boleh diuji!” ungkap Ahok (Santosa,2015,h.xi).

Bagi Burke, proses rasa bersalah dan penebusan mengamankan keseluruhan konsep simbolisasi. Rasa bersalah, adalah motif utama untuk semua aktivitas simbolik. Karena kita terus menerus, merasa bersalah, kita juga terus berusaha untuk memurnikan diri kita sendiri dari ketidaknyamanan rasa bersalah (West & Turner,2010,h.30). Proses rasa bersalah tersebut merupakan siklus awal bagi Ahok untuk masuk politik nasional.

5.2.3. Pertarungan Wacana Ahok VS Lulung dan Partai Gerindra

Dalam perkembangan situasi (*scene to scene*), adanya argumen-argumen sentral yang berkembang di sekitar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Wakil Ketua DPRD DKI

Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung. Ahok, sebagai aktor politik yang tidak segan-segan membalas komentar yang terlontar dari Lulung, begitu pun sebaliknya. Hampir setiap program yang disuguhkan Ahok akan kembali dikomentari oleh Haji Lulung.

Perdebatan awal Haji Lulung dan Ahok bermula saat Ahok menyebut kecurigaannya ada mark up anggaran pengadaan alat *Uninterruptible Power Supply (UPS)* terbukti menyusul penetapan oknum DPRD DKI Jakarta sebagai tersangka. Ucapan Ahok membuat panas telinga Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung dan kawan-kawannya. Saut-sautan bertambah panas ketika Lulung juga ikut angkat bicara dengan meminta Ahok berhati-hati dalam ucapannya.

Melalui Dramatisme mengarahkan bahasa sebagai hal primer karena mengungkapkan ekspresi dari seseorang. Terlihat jelas saat Ahok menanggapi komentar balasan dari Lulung, gesture tubuh dan bahasa yang dilontarkan Ahok terdengar lebih spontan kepada Lulung.

“Mohon dibantu juga kalau punya Lamborghini, pelat nomornya jangan bodong, biar bayar pajak. Jadi kalau kaya, terus punya Lamborghini, STNK-nya yang benar bayar pajak gitu lho. Bantu kita supaya pendapatan pajak kita nambah”(Tempo,13 Februari 2013)

Selain benturan argumen dengan Haji Lulung, peneliti juga menyajikan benturan Ahok dengan Partai Gerindra, merupakan partai pengusung Ahok menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 2014 silam. Melalui dramatik tersebut bahwa elemen *scene* dan *agent* adalah yang paling dominan dan berpengaruh dalam tindakan komunikasi serta motif dari sikap politik Ahok. Alur *scene* yang dimulai dari pilpres 2014 yang telah usai, namun kontestasi pilpres masih sangat terasa kental. Untuk itu tema-tema sentral pada saat itu yang berkembang seputar keterbelahan dua koalisi besar, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), perbedaan pandangan RUU Pilkada, dan dualisme kepengurusan partai membuat kompas politik nasional berubah arah Koalisi Merah Putih

(Gerindra, Golkar PKS, PAN, PPP dan Demokrat) pengusung Prabowo-Hatta, mengadakan sidang paripurna untuk melakukan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Sikap yang diambil KMP dianggap politik balas dendam karena gagal “menduduki” Istana Negara. Sementara SBY dari Demokrat sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dinilai rakyat sebagai penghianat demokrasi karena dianggap tidak menepati janjinya untuk mendukung pilkada langsung.

Peran Ahok disini sebagai *agent* juga disoroti, karena tujuan dari dramatisme adalah untuk melihat motif dari tindakan komunikasinya. Sikap politik zig-zagnya terlihat saat dirinya tidak sepakat dengan rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Hal tersebut dianggapnya seperti membuka luka lama zaman rezim gaya Orde Baru. Dulu tekad Ahok masuk Gerindra, karena memiliki ideologi yang sama. Gerindra berani mencalonkan dirinya karena rekam jejaknya walaupun berasal dari kalangan minoritas. Sebagai tokoh yang idealis, Ahok menyakini posisi Cawagub DKI Jakarta merupakan batu loncatan strategis selain untuk menunjukkan integritas sebagai politikus juga memberikan tontonan kepada masyarakat bahwa pilkada langsung rakyat mendapatkan kesempatan untuk memilih kepala daerah yang bersih, transparan, dan profesional.

Namun surat pengunduran dirinya pada keanggotaan Gerindra sebagai jawaban atas sikap perbedaan pandangan politiknya terkait Rancangan Undang Undang Pilkada yang diusulkan kepala daerah akan langsung dipilih oleh DPRD. Sedangkan ahok berpandangan bahwa pilkada mesti dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pengunduran dirinya memancing sejumlah reaksi sebagian besar aktor politik mendefenisikan sikap ahok sebagai politikus kutu loncat dan pragmatis. Hal tersebut mengingatkan kembali bahwa sebelum dipinang Gerindra, Ahok juga melakukan loncatan dari Golkar yang menghantarkannya ke kursi DPR RI yang dijalaninya selama dua setengah tahun.

Tampaknya sikap politik Ahok berusaha disimbolisasikan aktor politik lain. Sesuai dengan asumsi dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengaku kecewa dan menilai Ahok sebagai politikus oportunistis yang tidak mengerti etika yang menganggap partai sebagai '*kutu loncat*'. Sedangkan M.Taufik, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta menantang kekonsistenan Ahok, untuk mundur dari jabatan gubernur karena partai Gerindra yang berjasa menghantarkannya untuk menjadi Wakil Gubernur pada 2014 silam (Tempo, September 2014). Ahok jadi bulan-bulanan kader Gerindra bahkan ia dinilai sebagai Malin Kundang, Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J.Mahesa, kecewa kalau Ahok mundur sebagai kader yang telah membesarkannya. Desmond mensimbolisasikan Partai Gerindra seperti Ibu yang membesarkan Ahok (Santosa,2015,h.269).

Selepas Ahok dari Gerindra, tawaran dari Hanura, PKB dan PDIP pun berkumandang di media cetak dan elektronik. Presiden terpilih Joko Widodo mengapresiasi langkah Ahok keluar dari Gerindra, "Menurut saya, itu sebuah keberanian sikap beliau. Harus dihargai, Pak Ahok pasti merasakan sendiri bahwa Pilkada langsung menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan demokratis." Selain memuji, Jokowi mengaku senang jika Ahok berlabuh di PDI Perjuangan. "Kalau benar, berarti saya dapat satu ya," kata Jokowi (Kuwado,2014). Tuduhan terhadap dirinya sebagai politikus oportunistis tersebut salah alamat. Ahok meyakini bahwa tradisi meloncat dari satu partai ke partai lain, dari satu jabatan ke jabatan lain, merupakan masalah ambisi, tetapi ambisi tersebut berguna bagi masyarakat luas dan manusia harus memiliki ambisi untuk bisa sukses.

Melalui dramatisme peneliti menghasilkan penemuan dari *scene* ini peneliti melihat adanya pertarungan wacana yang bersinggungan dengan Ahok. Jejak-jejak pesan yang mereka artikuliskan menjelaskan bagaimana satu isu dengan isu lain dapat bersinggungan, bertentangan, untuk menunjukkan bagaimana bahasa yang digunakan untuk melakukan

seleksi, refleksi, defleksi (pembelokan) terhadap realitas yang disesuaikan dengan kepentingan mereka (Suparno,2012,h.115).

Suparno (2010) melalui disertasinya mendemostrasikan penggunaan dramatisme mampu memunculkan unsur-unsur motif kontestasi antar aktor politik dengan judul penelitian “Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia.” Data yang digunakan Suparno ialah berupa penelusuran pernyataan-pernyataan surat kabar Kompas sepanjang tahun 1997 sampai 1998. Dengan menggunakan teknik analisis pentad dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (*scene*) saling bersaing dan berkompetisi terhadap makna Reformasi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan. Dalam konteks ini, tindakan aktor dapat memperlihatkan apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang sama atau apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Suparno di atas mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penggunaan bahasa dalam sebuah pernyataan, sikap serta tindakan komunikasi dari Basuki Tjahaja Purnama di berbagai *scene*, mengandung makna dan motif tertentu. Peneliti juga menyajikan pernyataan-pernyataan verbal aktor-aktor yang pro dan kontra dari berbagai perspektif berbeda yang saling bersaing sehingga menimbulkan *clash of argument*.

Perubahan sikap antiklimaks Basuki Tjahaja Purnama saat memilih meninggalkan partai Gerindra menimbulkan spekulasi liar yang menuntut jawaban pasti. Narasi yang dibawakan Basuki Tjahaja Purnama dalam hal ini dapat membuat *misleading* opini dari lawan politiknya. Inilah jejak-jejak komunikasi yang memperlihatkan ada persaingan komunikasi yang menggambarkan kepentingan dari tiap-tiap individu yang diusahakan. Pada satu sisi, pihak yang kontra dengan pengunduran Ahok dari Gerindra mensymbolisasikan

Ahok sebagai “kutu loncat”, penghianat partai, malin kundang, serta arogansi kekuasaan. Sedangkan pihak pro dengan Ahok, diartikulasikan sedemikian rupa melalui penggambaran sebuah idealisme, sesuai koridor konstitusi, nasionalisme tinggi dan agung, serta menjunjung nilai demokrasi. Didukung oleh narasi politiknya yang disampaikan di Metro TV (September,2014) bahwa dirinya hanya loyal kepada partai yang sesuai konstitusi.

Berdasarkan pada rasio dramatik di atas, hasilnya menunjukkan bahwa elemen *agent* dan *purpose* merupakan elemen yang paling dominan dan berpengaruh dalam tindakan retorik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Latar belakang Ahok sebagai eksekutif pemerintahan, ia merasa memang tindakan (*act*) yang dilakukannya sudah benar karena dirinya taat pada konstitusi bukanlah konstituen.

5.2.4. Pengkambing Hitam (*Scapegoat*)

Melalui analisis dramatisme penulis juga mendapat temuan bahwa adanya negativitas dalam situasi ini yakni adanya penolakan terhadap sesuatu dalam tatanan sosial (west & turner,2008,h.31). Pada awalnya penertiban kebijakan relokasi PKL pasti ada masyarakat yang pro dan kontra akan kehadiran kebijakan tersebut. Bagi pihak yang kontra dapat dikatakan dalam pola negativitas. Masyarakat yang berada dalam tatanan sosial yang sudah ada berusaha melindungi diri dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini dianggap berbeda dalam tatanan sosial yang terbentuk. Terlihat pada saat upaya penertiban PKL di Tanah Abang oleh Ahok menuai kecaman dari berbagai paguyuban.

Merujuk pada hasil akhir yang ada dalam benak *agent* dan tindakan. Tentu di dalamnya memiliki motif tersembunyi yang alurnya akan membentuk drama. *Guilt-Redemption Cycle* merupakan akar semua retorik. Burke yakin, bahwa motivasi terakhir dari semua aktor adalah untuk membersihkan diri kita dari *guilt* yang pernah di alami aktor. Dalam situasi ini, untuk mengadministrasi keadilan sosial Ahok sebagai eksekutor

pemerintah berusaha menunjukkan dirinya tunduk pada konstitusi bukan konstituen. Aktor politik meyakinkan khalayak melalui pernyataan-pernyataannya bahwa ada sesuatu yang salah dan harus diubah yang menimbulkan *guilt* dalam diri khalayak. Burke menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang perfeksionis. Manusia ingin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kemauannya (Safitri,2014,h.15). Dalam diri khalayak yang merasakan *guilt* ini, akan ada *perspective of incongruity* yaitu ketidaksesuaian atau sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Ini tentu menggali sikap perfeksionis manusia. Untuk menghilangkan perasaan ketidaksempurnaan ini, manusia berpikir harus ada pihak yang disalahkan atas *incongruity* ini. Karenanya, Burke menganggap retorik adalah pencarian khalayak akan kambing hitam (*scapegoat*) yang sempurna.

Untuk menghilangkan *guilt*, menurut Burke, aktor mempunyai dua pilihan, yakni menyalahkan diri sendiri (*mortification*) dan mencari *scapegoat*, faktor eksternal sebagai pihak yang bersalah untuk bertanggung jawab (West & Turner,2008,h.31). Dalam drama politik yang terjadi, penulis melihat kecenderungan Ahok mencari *scapegoat* berbanding lurus dengan elemen *purpose* yakni, Ahok meyakini bahwa kecaman (pihak yang kontra) tersebut hanya berasal dari orang-orang yang kepentingan terusik di sekitar Pasar Tanah Abang, seperti; penyewa lapak, dan praktek premanisme yang diduga banyak dilakukan pungli oleh penguasa Tanah Abang termasuk di-*backup* oleh berbagai kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Hal tersebut diperkuat oleh argumen Ahok, yang menyatakan:

“Kenapa yang suka ribut itu itu yang nyewain lapak, atas nama paguyuban, persatuan. Kamu kalo jual-jual lapak, *gue penjara lu!* Jadi sebenarnya penyewa lapaknya yang saya marahi bukan PKLnya”.
(Sumber Dokumentasi: Kick Andy, Kontroversi Ahok,2016)

“Saya taat konstitusi bukan konstituen, tapi Jakarta anda lakukan apa saja akan menyenggol orang karena begitu banyak kepentingan. Tapi coba pikirkan baik-baik pernah tidak dalam sejarah tanah abang blok tanah abang dibagikan secara gratis”
(Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

Jika penulis menghubungkan dengan artikel Smudde & Courtright (2011) *A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation*, dalam penelitiannya melakukan analisis menggunakan *pentad* terkait masalah sehari-hari dalam mengelolapara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dilakukan bagi seorang praktisi *Public Relation*. Dengan menggunakan analisis *pentad*, maka akan membantu praktisi *Public Relation* untuk melakukan analisis dan perencanaan, identifikasi, penciptaan, peningkatan hubungan dengan *stakeholder*. Di tingkat ini *hexad* mengungkap dimensi mikropis penting bagi *stakeholder*. Pada akhirnya kombinasi analisis teori dan kasus disintesis menjadi pendekatan prospektif terhadap manajemen pemangku kepentingan yang mungkin digunakan organisasi selama perencanaan strategis.

Smudde & Courtright mengisahkan *The Black Dog Tavern* di Martha's Vineyard merupakan perusahaan terbesar di pulau tersebut dan memiliki hubungan positif dengan pemangku kepentingan karyawan dan masyarakat sebelum tahun 2001. Namun seiring perganti kepemimpinan digantikan putra pendiri perusahaan tersebut. CEO baru tersebut melakukan berbagai kebijakan strategis baru yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Ia memotong separuh tenaga kerja, menghapuskan putaran pembayaran sepanjang tahun dan menutup kedai minum selama 3 bulan pada musim dingin berikutnya. Hasilnya mengakibatkan kemarahan masyarakat, beberapa orang berpikir sumber masalah berasal dari perubahan (*gulit*) yang dijadikan *scapegoat*. CEO baru tersebut menerima kesalahan tersebut namun membenarkannya dengan argumen transenden bahwa kesehatan keuangan perusahaan lebih penting (*redemption*). Meskipun kepercayaan kepuasan lokal telah dilanggar, *The Black Dog Tavern* tetap menjadi penting bagi *stakeholders* (terutama turis dan pelanggan online yang menginginkan koleksi terbaru dan logo *The Black Dog Tavern*).

Implikasi artikel Smudde & Courtright dengan penelitian ini memiliki banyak segi kesamaan. Namun penulis berfokus pada retorika seorang aktor politik. Pada scene ini PKL

Tanah Abang sebelumnya tidak pernah terusik pada pemerintahan Fauzi Wibowo-Prijanto, namun pada saat masa pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama memberikan dampak pada pembenahan birokrasi dan perubahan iklim komunikasi Pemprov DKI terkait eksekusi penertiban PKL Pasar Tanah Abang. Perubahan pada pemerintahan Ahok dianggap tidak mengedepankan dialog dengan tokoh masyarakat dan mengkritik gaya komunikasi Ahok yang dinilai *low context* untuk masyarakat di Jakarta. Mayoritas masyarakatnya Jawa dan Betawi, seringkali ucapan Ahok menjadi persoalan. Sementara masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat Asia umumnya, berbudaya konteks tinggi (Mulyana, dikutip dari Edward T.Hall 1966,1976).Hal tersebut dibuktikan ketika para pengunjung rasa RAJJAM AHOK (Rakyat Jakarta Jahit Mulut Ahok) yang berasal dari paguyuban Betawi Bersatu mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, memperkarakan bicara Ahok yang selama ini keras, khususnya tudingan tentang oknum DPRD dan preman-preman yang mem-backing PKL Pasar Tanah Abang.

Scene di atas memperlihatkan bahwa Ahok yang dijadikan *scapegoat* untuk menebus perubahan pada iklim komunikasi Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, Ahok adalah aktor utama yang diposisikan sebagai akar dari permasalahan sehingga ia dipersalahkan, dan dihujat para pengunjung rasa tersebut. Menurut Suparno (2012,h.197) pengorbanan merupakan gambaran bagaimana seseorang melakukan perlawanan melalui sinisme terhadap kondisi yang dihadapinya. Sedangkan Ahok menyakini Pemprov DKI sudah melakukan sosialisasi sebelum eksekusi kebijakan relokasi penertiban PKL Pasar Tanah Abang. Sama halnya dengan salah satu asumsi teori dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Ahok mengetahui persis bahwa kentalnya praktik premanisme dengan aksi sewa lapak yang mahal di Tanah Abang dan keinginan para PKL berjualan dipinggir jalan merugikan rakyat menengah kebawah dan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum (*scapegoat*). Untuk itu sebagian masyarakat juga memaknai bahwa tindakan

Ahok memberikan rasa keadilan dengan mengembalikan fasilitas umum pada fungsinya melalui penegakan Perda Ketertiban Umum sudah tugasnya sebagai eksekutor kebijakan. Ahok juga menyiratkan dengan kata-kata bahwa tindakannya tersebut didukung oleh masyarakat khususnya Jokowi, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu.

“Kami lagi bangun pasar, retribusi harian, tidak disewakan, tapi anda tidka boleh curang, cucu anda tidak boleh dapat warisan kalau tidak Jakarta ini dikuasai orang kaya semua. Saya mengerti sekali semua PKL itu pengen di pinggir jalan.” Kata Ahok dengan tenang

(Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

“Beliau (Jokowi) instruksikan pada saya penyebab macet adalah PKL ini. Semua sudah tahu kan, tinggal eksekusi. Nah, itu apa persoalannya? Tinggal kamu punya nyali nggak? Karena kamu akan menyenggol oknum pedagang sama oknum Konglomerat, ya”

(Detik.com, Agustus 2013)

Melalui penemuan ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya kekonsistenan pada tindakan komunikasi politik Ahok melakukan penebusan menggunakan *scapegoat* :

5.1.1 Hasil Temuan *Scapegoat*

NO	Tatanan kelola pemerintahan DKI Jakarta	Lembaga Negara	Media
1	Pada <i>scene</i> Ahok bersitengang dengan Badan Pengawas Keuangan DKI Jakarta (BPK) terkait kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, pada <i>scene</i> tersebut Ahok mengkritik (<i>purpose</i>) agar BPK memperbaiki kinerja, kecermatan, objektif dalam evaluasi proses audit anggaran serta independen tanpa mudah ditunggangi oleh kepentingan politis karena menurutnya banyak oknum-oknum yang	Pada saat Ahok menjabat menjadi anggota DPR RI Komisi II, Ahok aktif memberikan kritik dan argumen kontroversial tentang mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kritik Ahok ditujukan kepada Bawaslu dan KPU untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan terobosan upaya menghindari	Pada <i>scene</i> Ahok melontarkan pernyataan bahwa berita yang ditayangkan TV ONE menyatakan banyak sekali fitnah dan pemberitaan yang dianggap tidak logis kontennya tidak <i>fair</i> dan menggiring opini untuk menjatuhkan citra Pemprov DKI.

	berlindung dibawah naungan pemerintah.	kecurangan dalam pemungutan suara, dan menciptakan iklim perpolitikan yang kondusif di mana individu-individu yang idealis dan bersih, transparan dan profesional serta mampu bersaing secara sehat	
2.	Pada <i>scene</i> sengketa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Ahok menegaskan praktek gelap memainkan anggaran masi terus terjadi. Ahok mengkritik keras anggota DPRD yang tidak suportif dalam upaya mewujudkan Bersih, Transparan, dan Profesional dalam roda pemerintahan Indonesia khususnya melalui pengelolaan anggaran daerah yang dilakukan menggunakan sistem <i>e-budgeting</i> .		
3	Pada <i>scene</i> Ahok mengkritik Komnas HAM dan warga yang menghambat relokasi Kalijodo, pada <i>scene</i> tersebut Ahok memberikan penekanan (<i>purpose</i>) agar Komnas HAM melakukan langkah yang harmonis dan sinergis dengan Pemprov DKI dalam menegakkan Perda untuk mengembalikan hak-hak negara sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) atas tanah ilegal yang dibuat warga menjadi pemukiman dan kawasan prostitusi yang sudah mengakar di		

PEMBAHASAN DAN DISKUSI PENELITIAN

5.1. Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama sebagai *political actor*

Pembahasan yang akan dianalisis peneliti yaitu berdasarkan data temuan penelitian terkait Retorika politik Basuki Tjahaja Purnama. Retorika politik bisa dipahami sebagai salah satu strategi persuasi untuk meyakinkan orang lain. Dalam konteks komunikasi politik, banyak orang yang menyamakan retorika dengan propaganda. Zamawi dan Johnston membedakan keduanya secara gamblang:

A Useful distinction to make at this point is between the persuasion of rhetoric, which seeks to find compelling arguments to convince people, and the coercion of propaganda, which insist people believe certain thing or act in certain way by using communication techniques to end discussion (Johnston dan Zawawi,2000,h.282)

Retorika mengedepankan argumentasi-argumentasi sedangkan propaganda lebih mirip paksaan, tak memberikan ruang bagi publik untuk berpikir dan berwacana. Finnemore mengatakan (Jackson & Krebs,2007,h.6) mekanismenya *political actor* berusaha mengembangkan pemahaman bersama dan dapat dikatakan sebagai persuasi untuk mencapai “klaim normatif.” Sasarannya untuk menginternalisasi keyakinan baru dan akibatnya mengadopsi identitas dan referensi baru. Tindakan *agent* menjadi struktur sosial, gagasan menjadi norma, dan subjektif menjadi intersubjektif.

Nimmo (2011,h.30) mengatakan perlunya para komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka di dalam masyarakat harus ditetapkan, yaitu Politisi (wakil dan ideolog), komunikator profesional (promotor dan jurnalis) dan aktivis (juru bicara dan pemuka pendapat). Dalam penelitian ini klasifikasi Basuki Tjahaja Purnama termasuk dalam komunikator politik kategori politisi ideolog karena ia merupakan produk dari proses

kaderisasi, meniti karir politik dimulai menjadi ketua Dewan Perwakilan Cabang PPIB (Partai Perhimpunan Indonesia Baru) Kabupaten Belitung Timur.

Hasil analisis data yang telah dikemukakan pada Bab IV sebelumnya dihubungkan dengan konsep-konsep yang dikemukakan pada Bab II merupakan dasar untuk pembahasan sesuai dengan tujuan akhir penelitian yang berjudul **“Studi Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* Tokoh Basuki Tjahaja Purnama Dalam Perspektif Dramatisme”**.

Tabel 5.1 Hasil Temuan Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

NO	Dasar Teori	Implikasi Penelitian	Hasil Temuan
1.	Atwater (2007) <i>Senator Barack Obama The Rhetoric of Hope and The American Dream</i>	Pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkapkan retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak sehingga menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat.	Kekhasan retorika Ahok terletak pada penggunaan bahasanya sebagai <i>style</i> yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan <i>powerful</i> . Contohnya penggunaan metafora, “rampok”, “maling”, “begal”, dalam sengketa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
2	Robert Ivie (2009) <i>The Complete Critism of Political Rhetoric</i>	Retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefenisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan manipulasi simbol politik.	Ahok mengartikulasikan bahasa-bahasanya, bahwa seorang pemimpin jabatan publik bukanlah pemimpin perusahaan, sudah seharusnya wajib berjuang untuk melayani kepentingan rakyat dan mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya.
3	Martin (2004) <i>Balancing on the political high wire The role of Humor in the rhetoric of Ann Richards</i>	Pemilihan kata-kata dan gaya berpidato pada humor dalam politik digunakan seorang <i>political actor</i> sebagai taktik untuk negosiasi dan reorganisasi.	Pada gaya bahasa Ahok menggunakan humor sebagai sarana mengidentifikasi khalayaknya untuk menyalurkan kritik atau <i>uneg-uneg</i> . Contohnya sikap Ahok mengkritik Wakil Ketua DPRD, Lulung dengan memberikan sindiran-sindiran yang dibalut bahasa sarkas di media.

Sumber: Olahan Peneliti,2017

5.1.1. Kekhasan Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

Atwater (2007) dalam jurnal penelitiannya *Senator Barack Obama The Rhetoric of Hope and The American Dream* mengeksplorasi retorika yang digunakan oleh senator Obama yang dikenal sebagai ahli pengelolaan kesan lewat dialognya yang merupakan *persuasion campaign* untuk mendapatkan simpati dan dukungan massa memilih Obama sebagai Presiden Kulit Hitam pertama di Amerika dengan menyentuh emosional warga Amerika melalui “*Politic of Hope*” menggunakan retorika tentang kisah hidup dan masa lalunya. Pidato Obama yang telah dikemas dalam bahasa yang mengandung wacana tertentu dengan memproyeksikan visi kesatuan politik untuk memikat hati warga Amerika yang mendengarkan.

Penelitian Atwater diatas telah mendukung serta memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menggunakan kajian komunikasi politik, *genre actor and rhetoric*. Atwater menunjukkan pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkap retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak. Kuatnya pesan yang disampaikan aktor sehingga hal tersebut menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat.

Implikasi dari penelitian Atwater terkait studi *political actor and rhetoric*, peneliti membahas Basuki Tjahaja Purnama menemukan kekhasan retorika Ahok terletak pada penggunaan bahasanya sebagai *style* yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan *powerful* sebagai bentuk strategi retorika dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat umum. Contohnya, penggunaan metafora, tampak ketika Ahok menyebut “rampok”, “maling”, “begal”, dalam sengketa ‘dana siluman’ RAPBD 2015

(Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta. Aristoteles (West & Turner, 2007, h. 346) menyarankan penggunaan metafora untuk membantu *audience* memahami hal-hal yang kurang jelas sehingga lebih mudah dipahami.

5.1.2. Artikulasi Bahasa Seorang Pejabat Publik

Robert Ivie (2009) dalam jurnal penelitiannya *The Complete Criticism of Political Rhetoric* melakukan penelitian terkait pidato Presiden Ronald Reagan yang disebut sebagai *the great communicator*. Dikarenakan ia mampu berkomunikasi dengan lawan maupun kawan politiknya dengan gayanya yang khas selebriti, Reagan sadar betul bagaimana peranan TV sebagai media sangat besar pengaruhnya. Reagan sangat piawai dalam berpidato, kata-katanya singkat namun tajam, Reagan mengkomunikasikan “sentimen bukan gagasan.” Keahliannya menguasai panggung politik dengan penggunaan pementasan, waktu dan bakat pribadi, serta kemampuannya mengimbangi masalah politik yang diciptakan oleh kata-katanya sendiri. Bahasa Reagan mampu menunjukkan bahwa “ia milik rakyat” merupakan pelayan yang melayani rakyat. Sementara bahasa non-verbal seperti gerak tubuh, senyum, intonasi suara, merupakan bagian dari kesan emosional yang diperlukan.

Artikel ini juga menjelaskan bahwa retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefinisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan manipulasi simbol politik. Kerusakan sosial diakibatkan oleh komunikasi politik yang buruk karena gagal mengartikulasikan kebutuhan sosial dan mentransmisikan nilai-nilai politik tersebut.

Hasil penelitian milik Ivie memiliki perbedaan dengan penelitian ini, Reagan ditampilkan sebagai aktor politik yang pandai membangun kesan baik di media. Memungkinkan Reagan yang memiliki agenda berlawanan namun tanpa terdengar seperti pemberontak sedangkan Ahok merupakan figur yang blak-blak-an, berintonasi tinggi bahkan

cenderung kasar dapat menimbulkan konfrontasi langsung. Hal ini tampak saat dirinya sedang berhadapan dengan Haji Lulung. Ahok kerap kali. Ia dengan lugas.

Kesamaan dari objek penelitian bahwa Ahok juga kerap kali mengartikulasikan bahasa-bahasanya, bahwa seorang pemimpin jabatan publik bukanlah pemimpin perusahaan, sudah seharusnya wajib berjuang untuk melayani kepentingan rakyat dan mengadministrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dilayaninya yang merupakan implementasi dari bulir-bulir Pancasila.

"Kalau dulu saya liat orang miskin tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, saya pakai dompet saya. Saya pergi melayani orang dengan mobil saya. Ketika saya jadi pejabat, saya tidak pernah tahu apa itu uang bensin. Uang rakyat yang membayari saya. Saya hanya mendistribusikan uang itu kepada rakyat, jadi saya untung. Saya untung menolong orang dengan uang rakyat itu sendiri. Jadi, kalau rakyat memiliki pejabat yang mau menjadi penolong, jadi pelayan mereka, maka saya kira kita tidak akan mungkin melakukan korupsi." (Gunawan, 2013, h.111)

5.1.3. Gaya Bahasa Basuki Tjahaja Purnama

Martin (2004) dalam penelitiannya *Balancing on the political high wire the role of Humor in the rhetoric of Ann Richards* ini melakukan pemeriksaan retorika dari karir politik mantan Gubernur Texas Ann Richards yang mengungkapkan peranan penting retorika humor dalam strategi komunikasi politik perempuan. Richards menggunakan humor agar berhasil bernegosiasi peran pada sesuatu yang saling bertentangan atau menghambat, termasuk partai politik luar nasional terhadap Texas dan wanita terhadap politisi. Richards juga menggunakan humor sebagai taktik untuk negosiasi dan reorganisasi keunggulan dan subordinasi harapan gender dalam kehidupan publik.

Mengingat kasus Ann Richards tersebut, artikel ini membahas kendala dan peluang faktor sosial politik dan budaya daerah terhadap retorika politik perempuan. Akhirnya, analisis isi dan gaya berpidato politik Richards mengembangkan pemahaman tentang

bagaimana fungsi humor sebagai retorika dalam bernegosiasi. Hal ini juga menunjukkan salah satu cara wanita untuk dapat menantang gender yang telah dianggap marginal dalam dunia politik.

Hasil penelitian yang telah dilakukan Martin, mengatakan Humor dalam situasi sosial dapat dijadikan untuk mengidentifikasi khalayak. Humor dalam situasi politik merupakan strategi untuk meningkatkan popularitas. Komunikator dapat melakukan persuasi dengan efektif, karena hal ini telah direncanakan dan disiapkan dengan matang. Hal ini merupakan pembelajaran bagi semua orang, bahwa retorika itu seni bagaimana seseorang dapat menyampaikan secara efektif serta persuasif dan humor pun dapat digunakan sebagai senjata untuk mencapai tujuan tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Ann Richards.

Penelitian diatas dapat dikaitkan dengan gaya bahasa aktor politik Basuki Tjahaja Purnama berasal dari suku minoritas, menjadi gubernur bagi mayoritas masyarakat Betawi dan muslim di DKI Jakarta. Sikap dirinya sebagai oposisi dan pengkritik DPRD kerap kali memberikan sindiran-sindiran yang lugas dan langsung saat di undang dalam acara *Stand Up Comedy* pada Mei 2015 lalu. Dalam tesis sekaligus disertasi karya dari Wilson (2008) berjudul "*Was That Supposed to be Funny? A rhetorical Analysis of Politics, Problem, and Contradiction Stand-up Comedy*". Wilson meneliti mengenai kemungkinan humor atau lawakan sebagai bentuk aktivitas politik, ia tertarik pada efektivitas humor dalam politik, terutama saat ini, dimana dengan adanya *stand-up comedy* yang dapat dengan bebas dinikmati masyarakat dan tersebar luas melalui media massa. Tentu sebagai *rhetor* ahok yang dikenal tegas, dan berbicara lugas ia memiliki kesempatan untuk mengambil panggung *stand up comedy* untuk menyelipkan pesan politik melalui gaya bahasanya yang sarkas sebagai strategi komunikasinya kepada lawan politiknya.

Humor yang mengandung bahasa-bahasa sarkas yang digunakan Ahok sebagai sarana mengidentifikasi khalayaknya untuk menyalurkan kritik atau *uneg-uneg*. Sama halnya seperti yang dikatakan James Danandjaya (dalam Rahmanadji,2007, h.7) fungsi humor yang paling menonjol, yaitu sebagai sarana penyalur perasaan yang menekan diri seseorang. Perasaan itu bisa disebabkan oleh macam-macam hal, seperti ketidakadilan sosial, persaingan politik, ekonomi, suku bangsa, atau golongan. Tanpa dibalut kalimat yang berputar-putar. Masih terkait anggaran siluman, Ahok menyindir oknum DPRD DKI secara objektif yang mengusulkan pembelian *uninterruptible power supply* (UPS) kerap menjadi topiknya dalam komunikasi kepada lawan politiknya menimbulkan kesan agresif namun mengandung humor.

Tampilan bahasa humor diungkapkan Ahok ditonjolkan pada saat menanggapi-menanggapi pernyataan Haji Abraham Lunggana alias Lulung terkait kasus RAPBD pada tahun 2015, Sumber Waras, hingga PKL Tanah Abang. Bahasa-bahasa yang ditonjolkan Ahok kerap kali ditanggapi dengan santai oleh Ahok. Dari Hal tersebut tampaknya Ahok tidak menanggapi serius setiap perkataan Wakil Ketua DPR Tersebut Hal ini terucap langsung pada saat Ahok menanggapi perkataan Lulung bahwa seharusnya Ahok pantas dijadikan tersangka RAPBD 2015 bahkan dirinya dianjurkan cek kesehatan jiwa:

“Saya memang agak sakit jiwa, Cuma pas diperiksa kesehatan jiwanya..Saya memang agak sakit jiwa, Cuma pas diperiksa lolos, pas gitu ukurannya. Sekarang ukurannya bukan tes kesehatan jiwa lagi. Harusnya mendagri bisa copot anggota dewan seperti itu. (Santosa,2015,h.189)

“Saya pikir Haji Lulung bukan sekolah Polisi ya, kalau dia sekolah Polisi saya akan usul kepada Pak Jokowi untuk menggantikan Pak Buas sebagai Kabareskrim, tapi sayang ga bisa, mohon maaf ya” (Metro TV,29 Juli 2015)

“Itu Sodara Lulung itu, dia harus belajar banyak hal lah, contohnya kalo punya Lamborgini itu bayar pajak, dia itu mungkin mau ditangkap KPK karena gratifikasi karena dia bilang dulu minjam itu lamborgininya” (Metro TV,17 Februari 2016)

Jika ditelaah, dilihat dari kalimat dan pilihan kata (diksi) yang digunakan Ahok kepada Lulung cukup frontal. Ahok menyindir Lulung yang berprofesi sebagai

pengacara namun tidak mengerti Hukum. Setiap kalimat yang ia lontarkan berupa pernyataan balasan skeptis terkait hal-hal yang menurutnya tidak benar. Bahasa-bahasa sarkas yang dilontarkan Ahok terkadang menohok dan mengharapkan orang lain yang mendengarnya membaca pikiran dan tujuan pembicarannya, meskipun tidak mengucapakan secara spesifiknya untuk itu tugas lawan bicaralah untuk mengetahui apa yang dimaksudnya.

5.2. Basuki Tjahaja Purnama dalam Studi Dramatisme

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat dominan seorang Basuki Tjahaja Purnama sebagai *agent* melalui dramatisme menempatkan peran-pernik personal yang menyertai nilai motivasional seperti gagasan, keinginan, ketakutan, kedengkian, intuisi, imajinasi dan ekspresi personalitas lainnya. Melalui penjelasan Burke (West & Turner,2010,h.33) peneliti dapat melihat ciri-ciri yang dimiliki *agent* seperti ego, konsep diri, super ego, kesadaran, keinginan, objektif, pikiran, semangat dan ekspresi. *Agent* tidak hanya dipandang secara individual atau personal, tetapi dapat merupakan super person seperti ras, bangsa dan etnis misalnya (Suparno,2011,h.198).

Selain mengembangkan teori dramatisme, Burke juga menciptakan suatu metode untuk menerapkan teorinya terhadap sebuah pemahaman tentang aktivitas simbolik (West & Turner,2013,h.32-33). Metode tersebut adalah pentad, yang terdiri dari lima point antara lain *act* (apa yang sedang dilakukan), *scene* (dalam keadaan atau situasi apa tindakan dilakukan), *agent* (orang seperti apa yang melakukannya), *agency* (dengan cara apa ia melakukannya) dan *purpose* (untuk tujuan apa) (Weiser 2007, h.293). Dalam hal ini pentad berfungsi untuk menjelajah tata bahasa dari motif yang terus-menerus diciptakan melalui simbol oleh manusia (Rutten & Soetart, 2009,h.7). Sehingga pentad di maksudkan sebagai alat untuk menganalisa motif yang disajikan seseorang dalam wacana nya (Kneupper,1979,h.132).

Gambar 5.1 Basuki Tjahaja Purnama dalam Pentad Dramatisme

Sumber: Olahan Peneliti,2017

Tabel 5.2 Hasil Temuan Dramatisme

NO	Dasar Teori	Implikasi Penelitian	Hasil Temuan
1	Koehn (2010) <i>Ethical Eltism: A Burkean Analysis ogf the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush</i>	Dengan Analisis pentad mengungkapkan fokus retorika politik sekaligus motif dari penggunaan retorika yang dibangun seorang <i>political actor</i> .	Fokus retorika Ahok terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan Pemerintah yang bersih, transparan dan profesional.
2.	Schultz (2011) <i>A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse</i>	Dengan Analisis pentad mengungkapkan penebusan rasa bersalah.	Penebusan rasa bersalah Ahok tampak saat dirinya terlibat dalam kancah politik nasional berangkat dari rasa bersalah yang merasa miris melihat kondisi birokrasi pemerintah di Belitung Timur.
3	Suparno (2010) Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia.”	Dengan menggunakan teknik analisis pentad dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (<i>scene</i>) saling bersaing dan berkompetisi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan.	Melalui penelitian ini Dramatisme mengarahkan bahasa sebagai hal primer karena mengungkapkan ekspresi dari seseorang. Terlihat jelas saat Ahok menanggapi komentar balasan dari Lulung, gesture tubuh dan bahasa yang dilontarkan Ahok terdengar lebih spontan kepada lulung. Selain itu terlihat adanya benturan argumen dari kader Partai Gerindra yang menganggap Ahok sebagai ‘Kutu Loncat’ dan ‘Malin Kundang’ saat dirinya mendeklarasikan keluar dari keanggotaan Partai Gerindra.
4	Smudde & Courtright (2011) <i>A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation</i>	Melalui dramatisme menggunakan analisis pentad akan terlihat elemen <i>scapegoat</i> .	Melalui penemuan ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya kekonsistenan pada tindakan komunikasi politik Ahok melakukan penebusan menggunakan <i>scapegoat</i> kepada Lembaga Pemerintahan, Tatanan Kelola Pemerintahan DKI Jakarta, dan Media.

Sumber: Olahan Peneliti,2017

5.2.1. Fokus Retorika Politik Basuki Tjahaja Purnama

Untuk itu Disertasi penelitian Koehn (2010) yang berjudul *Ethical Eltism: A Burkean Analysis of the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush* mendukung penelitian ini. Selain menggunakan pentad, artikel Koehn juga berada dalam studi pendekatan *political actor and rhetoric*. Penelitian tersebut menganalisis

pidato dan pernyataan yang disampaikan secara retorik Bush dalam masa jabatan pertamanya. Tujuannya untuk fokus melihat isu-isu moral dan etika yang coba dibangun Bush dalam setiap pidatonya. Hasilnya topik retorika yang digagas Bush terkait teror dan perang merupakan ancaman bagi keamanan global yang dialamatkan kepada negara Irak dan Afganistan bahwa Irak merupakan ancaman nuklir, nada yang sama juga ditekankan Bush saat memberikan pidato tentang Afganistan dia menjelaskan bahwa negara tersebut terdiri dari pemimpin korup yang menghancurkan orang-orang yang tinggal di Afganistan dan secara bersamaan menawarkan ancaman lanjutan ke AS. Dan isu-isu moral lain terkait menolak mengakui amandemen konstitusional pernikahan sesama jenis. Setiap pidatonya Bush sebagai *agent* memosisikan dirinya yang konservatif sebagai menjaga kehidupan manusia (*pro-life*) menolak pernikahan sesama jenis, secara tegas mendukung hukum yang melarang percobaan penelitian *embryonic stem cell* yang bertentangan dengan nilai-nilai kristiani ortodoks.

Implikasi dihasilkan oleh Koehn menunjukkan, penggunaan dramatisme serta analisis pentad dalam komunikasi politik terbukti bekerja dengan baik, sebagaimana hasil penelitian dari Koehn telah menunjukkan bahwa dramatisme telah mampu mengungkapkan bagaimana fokus retorika politik dari Ahok sekaligus motif dari penggunaan retorika tersebut. Sehingga hal ini sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menggunakan dramatisme serta analisis pentad.

Setelah melakukan analisis, peneliti dibantu menggunakan dramatisme untuk mengidentifikasi topik retorika Ahok, hasilnya adalah fokus retorika Ahok berdasarkan data adalah terkait penegakan hukum, demokrasi, pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. Untuk mendukung itu Ahok perlu menampilkan dirinya sebagai sosok *rhetor* yang kredibel dan terpercaya. Agar komunikator dan komunikan memiliki persepsi yang sama terhadap isu yang disampaikan. Contohnya Ahok pernah dinobatkan sebagai “10 Tokoh Pilihan yang mengubah Indonesia” versi majalah Tempo (2006), peraih

pin emas pejuang demokrasi dari Forum Demokrasi (2006), dan penghargaan tokoh anti korupsi *Bung Hatta Anti Corruption Award* (2013).

5.2.2. Penebusan rasa bersalah

Jika dilihat kondisi politik Indonesia pada tahun 2004 itu terlihat bahwa tema-tema yang berkembang masih terkait tema legitimasi kekuasaan, marketing politik, *money-politic* hingga korupsi masih menjadi warna. Kekecewaan masyarakat atas hasil pemilu yang cukup berasal karena perilaku elit partai tidak menunjukkan contoh yang baik bagi khalayak (Firmanzah, 2010, h.91). Kesan bahwa politisi meninggalkan konstituennya dan hanya sibuk untuk kepentingan partainya atau kepentingan pribadinya semakin tampak. Parpol dicitrakan sebagai alat mencapai kekuasaan dan menumpuk kekayaan, sedangkan kekuasaan disalahgunakan untuk menangguk keuntungan dari masyarakat. Sehingga semakin jelas jarak antara pejabat selaku elit politik dan konstituennya semakin jauh.

Untuk itu Ahok sebagai *rhetor* berupaya memposisikan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) bukan hanya sebagai merekrut kader dan pendulang suara (*vote getter*) untuk keperluan kampanye. Namun pada masa itu ia dituntut untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk tidak apatis pada kondisi politik nasional. Pernyataan-pernyataan Ahok yang lugas, dan tegas dalam menangkis memberikan bantuan uang pada konstituen, menunjukkan terjadinya diskursus rasional di masyarakat. Salah satu senjata utama dalam argumentasi-argumentasi rasionalitas Ahok, melalui pernyataan-pernyataannya adalah keinginan mendudukan kembali substansi masalah yang pada saat itu menjadi subyek perdebatan di dalam *mindset* masyarakat. Contohnya mengatakan:

“Goblok!Goblok!Goblok! Kalian mendukung partai saya tanpa peduli, bahkan tanpa mengetahui apa ideologi partai saya yang penting karena sudah banyak mendapatkan bantuan (Santosa, 2015, h.72)”

”Coba bayangkan harga baju kaos bola yang hanya Rp15.000,-, mereka telah rela memberikan nasib mereka dan anak cucu kepada partai saya. Bayangkan Rp15.000,- kalau dibagi 5 tahun/bulan mereka baru bisa

mendapatkan RP250 per bulan. Sedangkan saya bisa memperoleh sekian juta rupiah. Di tambah jika saya tidak memperjuangkan jaminan sosial untuk mereka di APBD, maka mereka akan “dirampok” oleh biaya kesehatan, pendidikan dan modal kerja (Purnama,2008,h.31).

Kesimpulan dramatik dari Basuki Tjahaja Purnama diatas menunjukkan dominannya element *agent* dan *scene* berpengaruh dalam tindakan komunikasinya. Keputusan Ahok bergabung dengan Partai PIB disebabkan oleh rasa tak puas karena hanya bertindak sebagai penonton dalam kancah politik. Namun salah satu asumsi dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol (West & Turner,2013,h28). Masyarakat pada saat itu menganggap menjadi pejabat pasti akan berujung melakukan korupsi sehingga banyak orang mulai mencibirnya bahwa ia terlalu ambisius, gila dan tak tahu diri.

Untuk memperkuat penelitian, peneliti menggunakan artikel Schultz (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse* yang juga sama-sama menggunakan pendekatan dramatisme. Beliau berusaha menjelaskan motif dari tindakan menggunakan kerangka interpretasi Kenneth Burke ditujukan kepada pelaku pelecehan seksual di Amerika. Melalui penelitian ini wacana *moral panics* dibangun sebagai tindakan pencegahan hasil ekspos oleh surat kabar, masyarakat, badan legislatif, dan LSM. Pelaku yang melakukan kejahatan seksual akan dihukum, direhabilitasi dan akan diberikan label “Predator seksual” yang disimbolisasikan sebagai monster jahat, tua, kotor, serigala berbulu domba.

Hasilnya simbolisasi seperti itu akan membuat pelanggar mengalami perasaan bersalah dan penyesalan, rasa malu menghasilkan tindakan isolasi terhadap orang lain karena dianggap sangat keji. Melalui perspektif Burke, membantu kita memahami paksaan di balik sifat ketertiban sosial, dan bagaimana sang aktor didorong untuk pengorbanan untuk

mencapai penebusan. Burke berfokus pada cara di mana mendesak untuk pemurnian. Pengalaman dari rasa malu membujuk aktor tersebut untuk meredakan kesalahannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Schulz memiliki kesamaan dengan peneliti menggunakan kajian pentad drama selain meneliti retorika serta motif dari tindakan bahwa pentad drama juga dapat mengungkapkan rasa bersalah dan penebusan atas masa lalu seseorang. Perbedaannya Schulz berorientasi pada pelaku pelecehan seksual pada anak-anak sedangkan objek penelitian yaitu seorang aktor politik Basuki Tjahaja Purnama. Adapun jika dilihat melalui studi dramatisme, keinginan besar Ahok masuk dalam kancah politik nasional berangkat dari rasa bersalah yang merasa miris melihat tatanan hierarki (kondisi) birokrasi pemerintah yang korup. Sebagai mantan pengusaha CV Panda, dirinya pernah bertikai dengan para pejabat yang meminta menanggung keuntungan bersama, namun ia dengan tegas menolak untuk menafkahi para pejabat nakal dan memilih untuk menutup pabrik. Untuk itu ia ingin melakukan penebusan rasa bersalahnya dengan menjadi pejabat publik untuk mematahkan stigma negatif:

“Saya ingin membuktikan, anggapan orang-orang bahwa pejabat pasti korup, pejabat tidak pernah benar-benar bekerja untuk rakyat, itu salah. Stigma itu mau saya lawan, boleh diuji!” ungkap Ahok (Santosa,2015,h.xi).

Bagi Burke, proses rasa bersalah dan penebusan mengamankan keseluruhan konsep simbolisasi. Rasa bersalah, adalah motif utama untuk semua aktivitas simbolik. Karena kita terus menerus, merasa bersalah, kita juga terus berusaha untuk memurnikan diri kita sendiri dari ketidaknyamanan rasa bersalah (West & Turner,2010,h.30). Proses rasa bersalah tersebut merupakan siklus awal bagi Ahok untuk masuk politik nasional.

5.2.3. **Pertarungan Wacana Ahok VS Lulung dan Partai Gerindra**

Dalam perkembangan situasi (*scene to scene*), adanya argumen-argumen sentral yang berkembang di sekitar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Wakil Ketua DPRD DKI

Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung. Ahok, sebagai aktor politik yang tidak segan-segan membalas komentar yang terlontar dari Lulung, begitu pun sebaliknya. Hampir setiap program yang disuguhkan Ahok akan kembali dikomentari oleh Haji Lulung.

Perdebatan awal Haji Lulung dan Ahok bermula saat Ahok menyebut kecurigaannya ada mark up anggaran pengadaan alat *Uninterruptible Power Supply (UPS)* terbukti menyusul penetapan oknum DPRD DKI Jakarta sebagai tersangka. Ucapan Ahok membuat panas telinga Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung dan kawan-kawannya. Saut-sautan bertambah panas ketika Lulung juga ikut angkat bicara dengan meminta Ahok berhati-hati dalam ucapannya.

Melalui Dramatisme mengarahkan bahasa sebagai hal primer karena mengungkapkan ekspresi dari seseorang. Terlihat jelas saat Ahok menanggapi komentar balasan dari Lulung, gesture tubuh dan bahasa yang dilontarkan Ahok terdengar lebih spontan kepada Lulung.

“Mohon dibantu juga kalau punya Lamborghini, pelat nomornya jangan bodong, biar bayar pajak. Jadi kalau kaya, terus punya Lamborghini, STNK-nya yang benar bayar pajak gitu lho. Bantu kita supaya pendapatan pajak kita nambah”(Tempo,13 Februari 2013)

Selain benturan argumen dengan Haji Lulung, peneliti juga menyajikan benturan Ahok dengan Partai Gerindra, merupakan partai pengusung Ahok menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 2014 silam. Melalui dramatik tersebut bahwa elemen *scene* dan *agent* adalah yang paling dominan dan berpengaruh dalam tindakan komunikasi serta motif dari sikap politik Ahok. Alur *scene* yang dimulai dari pilpres 2014 yang telah usai, namun kontestasi pilpres masih sangat terasa kental. Untuk itu tema-tema sentral pada saat itu yang berkembang seputar keterbelahan dua koalisi besar, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), perbedaan pandangan RUU Pilkada, dan dualisme kepemimpinan partai membuat kompas politik nasional berubah arah Koalisi Merah Putih

(Gerindra, Golkar PKS, PAN, PPP dan Demokrat) pengusung Prabowo-Hatta, mengadakan sidang paripurna untuk melakukan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Sikap yang diambil KMP dianggap politik balas dendam karena gagal “menduduki” Istana Negara. Sementara SBY dari Demokrat sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dinilai rakyat sebagai penghianat demokrasi karena dianggap tidak menepati janjinya untuk mendukung pilkada langsung.

Peran Ahok disini sebagai *agent* juga disoroti, karena tujuan dari dramatisme adalah untuk melihat motif dari tindakan komunikasinya. Sikap politik zig-zagnya terlihat saat dirinya tidak sepakat dengan rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Hal tersebut dianggapnya seperti membuka luka lama zaman rezim gaya Orde Baru. Dulu tekad Ahok masuk Gerindra, karena memiliki ideologi yang sama. Gerindra berani mencalonkan dirinya karena rekam jejaknya walaupun berasal dari kalangan minoritas. Sebagai tokoh yang idealis, Ahok menyakini posisi Cawagub DKI Jakarta merupakan batu loncatan strategis selain untuk menunjukkan integritas sebagai politikus juga memberikan tontonan kepada masyarakat bahwa pilkada langsung rakyat mendapatkan kesempatan untuk memilih kepala daerah yang bersih, transparan, dan profesional.

Namun surat pengunduran dirinya pada keanggotaan Gerindra sebagai jawaban atas sikap perbedaan pandangan politiknya terkait Rancangan Undang Undang Pilkada yang diusulkan kepala daerah akan langsung dipilih oleh DPRD. Sedangkan ahok berpandangan bahwa pilkada mesti dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pengunduran dirinya memancing sejumlah reaksi sebagian besar aktor politik mendefenisikan sikap ahok sebagai politikus kutu loncat dan pragmatis. Hal tersebut mengingatkan kembali bahwa sebelum dipinang Gerindra, Ahok juga melakukan loncatan dari Golkar yang menghantarkannya ke kursi DPR RI yang dijalaninya selama dua setengah tahun.

Tampaknya sikap politik Ahok berusaha disimbolisasikan aktor politik lain. Sesuai dengan asumsi dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengaku kecewa dan menilai Ahok sebagai politikus oportunistis yang tidak mengerti etika yang menganggap partai sebagai '*kutu loncat*'. Sedangkan M.Taufik, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta menantang kekonsistenan Ahok, untuk mundur dari jabatan gubernur karena partai Gerindra yang berjasa menghantarkannya untuk menjadi Wakil Gubernur pada 2014 silam (Tempo, September 2014). Ahok jadi bulan-bulanan kader Gerindra bahkan ia dinilai sebagai Malin Kundang, Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J.Mahesa, kecewa kalau Ahok mundur sebagai kader yang telah membesarkannya. Desmond mensimbolisasikan Partai Gerindra seperti Ibu yang membesarkan Ahok (Santosa,2015,h.269).

Selepas Ahok dari Gerindra, tawaran dari Hanura, PKB dan PDIP pun berkumandang di media cetak dan elektronik. Presiden terpilih Joko Widodo mengapresiasi langkah Ahok keluar dari Gerindra, "Menurut saya, itu sebuah keberanian sikap beliau. Harus dihargai, Pak Ahok pasti merasakan sendiri bahwa Pilkada langsung menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan demokratis."Selain memuji, Jokowi mengaku senang jika Ahok berlabuh di PDI Perjuangan. "Kalau benar, berarti saya dapat satu ya," kata Jokowi (Kuwado,2014). Tuduhan terhadap dirinya sebagai politikus oportunistis tersebut salah alamat. Ahok meyakini bahwa tradisi meloncat dari satu partai ke partai lain, dari satu jabatan ke jabatan lain, merupakan masalah ambisi, tetapi ambisi tersebut berguna bagi masyarakat luas dan manusia harus memiliki ambisi untuk bisa sukses.

Melalui dramatisme peneliti menghasilkan penemuan dari *scene* ini peneliti melihat adanya pertarungan wacana yang bersinggungan dengan Ahok. Jejak-jejak pesan yang mereka artikulaskan menjelaskan bagaimana satu isu dengan isu lain dapat bersinggungan, bertentangan, untuk menunjukkan bagaimana bahasa yang digunakan untuk melakukan

seleksi, refleksi, defleksi (pembelokan) terhadap realitas yang disesuaikan dengan kepentingan mereka (Suparno,2012,h.115).

Suparno (2010) melalui disertasinya mendemostrasikan penggunaan dramatisme mampu memunculkan unsur-unsur motif kontestasi antar aktor politik dengan judul penelitian “Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia.” Data yang digunakan Suparno ialah berupa penelusuran pernyataan-pernyataan surat kabar Kompas sepanjang tahun 1997 sampai 1998. Dengan menggunakan teknik analisis pentad dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (*scene*) saling bersaing dan berkompetisi terhadap makna Reformasi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan. Dalam konteks ini, tindakan aktor dapat memperlihatkan apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang sama atau apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Suparno di atas mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penggunaan bahasa dalam sebuah pernyataan, sikap serta tindakan komunikasi dari Basuki Tjahaja Purnama di berbagai *scene*, mengandung makna dan motif tertentu. Peneliti juga menyajikan pernyataan-pernyataan verbal aktor-aktor yang pro dan kontra dari berbagai perspektif berbeda yang saling bersaing sehingga menimbulkan *clash of argument*.

Perubahan sikap antiklimaks Basuki Tjahaja Purnama saat memilih meninggalkan partai Gerindra menimbulkan spekulasi liar yang menuntut jawaban pasti. Narasi yang dibawakan Basuki Tjahaja Purnama dalam hal ini dapat membuat *misleading* opini dari lawan politiknya. Inilah jejak-jejak komunikasi yang memperlihatkan ada persaingan komunikasi yang menggambarkan kepentingan dari tiap-tiap individu yang diusahakan. Pada satu sisi, pihak yang kontra dengan pengunduran Ahok dari Gerindra mensymbolisasikan

Ahok sebagai “kutu loncat”, penghianat partai, malin kundang, serta arogansi kekuasaan. Sedangkan pihak pro dengan Ahok, diartikulasikan sedemikian rupa melalui penggambaran sebuah idealisme, sesuai koridor konstitusi, nasionalisme tinggi dan agung, serta menjunjung nilai demokrasi. Didukung oleh narasi politiknya yang disampaikan di Metro TV (September,2014) bahwa dirinya hanya loyal kepada partai yang sesuai konstitusi.

Berdasarkan pada rasio dramatik di atas, hasilnya menunjukkan bahwa elemen *agent* dan *purpose* merupakan elemen yang paling dominan dan berpengaruh dalam tindakan retorik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Latar belakang Ahok sebagai eksekutif pemerintahan, ia merasa memang tindakan (*act*) yang dilakukannya sudah benar karena dirinya taat pada konstitusi bukanlah konstituen.

5.2.4. Pengkambing Hitam (*Scapegoat*)

Melalui analisis dramatisme penulis juga mendapat temuan bahwa adanya negativitas dalam situasi ini yakni adanya penolakan terhadap sesuatu dalam tatanan sosial (west & turner,2008,h.31). Pada awalnya penertiban kebijakan relokasi PKL pasti ada masyarakat yang pro dan kontra akan kehadiran kebijakan tersebut. Bagi pihak yang kontra dapat dikatakan dalam pola negativitas. Masyarakat yang berada dalam tatanan sosial yang sudah ada berusaha melindungi diri dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini dianggap berbeda dalam tatanan sosial yang terbentuk. Terlihat pada saat upaya penertiban PKL di Tanah Abang oleh Ahok menuai kecaman dari berbagai paguyuban.

Merujuk pada hasil akhir yang ada dalam benak *agent* dan tindakan. Tentu di dalamnya memiliki motif tersembunyi yang alurnya akan membentuk drama. *Guilt-Redemption Cycle* merupakan akar semua retorik. Burke yakin, bahwa motivasi terakhir dari semua aktor adalah untuk membersihkan diri kita dari *guilt* yang pernah di alami aktor. Dalam situasi ini, untuk mengadministrasi keadilan sosial Ahok sebagai eksekutor

pemerintah berusaha menunjukkan dirinya tunduk pada konstitusi bukan konstituen. Aktor politik meyakinkan khalayak melalui pernyataan-pernyataannya bahwa ada sesuatu yang salah dan harus diubah yang menimbulkan *guilt* dalam diri khalayak. Burke menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang perfeksionis. Manusia ingin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kemauannya (Safitri,2014,h.15). Dalam diri khalayak yang merasakan *guilt* ini, akan ada *perspective of incongruity* yaitu ketidaksesuaian atau sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Ini tentu menggali sikap perfeksionis manusia. Untuk menghilangkan perasaan ketidaksempurnaan ini, manusia berpikir harus ada pihak yang disalahkan atas *incongruity* ini. Karenanya, Burke menganggap retorik adalah pencarian khalayak akan kambing hitam (*scapegoat*) yang sempurna.

Untuk menghilangkan *guilt*, menurut Burke, aktor mempunyai dua pilihan, yakni menyalahkan diri sendiri (*mortification*) dan mencari *scapegoat*, faktor eksternal sebagai pihak yang bersalah untuk bertanggung jawab (West & Turner,2008,h.31). Dalam drama politik yang terjadi, penulis melihat kecenderungan Ahok mencari *scapegoat* berbanding lurus dengan elemen *purpose* yakni, Ahok meyakini bahwa kecaman (pihak yang kontra) tersebut hanya berasal dari orang-orang yang kepentingan terusik di sekitar Pasar Tanah Abang, seperti; penyewa lapak, dan praktek premanisme yang diduga banyak dilakukan pungli oleh penguasa Tanah Abang termasuk di-*backup* oleh berbagai kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Hal tersebut diperkuat oleh argumen Ahok, yang menyatakan:

“Kenapa yang suka ribut itu itu yang nyewain lapak, atas nama paguyuban, persatuan. Kamu kalo jual-jual lapak, *gue penjara lu!* Jadi sebenarnya penyewa lapaknya yang saya marahi bukan PKLnya”.
(Sumber Dokumentasi: Kick Andy, Kontroversi Ahok,2016)

“Saya taat konstitusi bukan konstituen, tapi Jakarta anda lakukan apa saja akan menyenggol orang karena begitu banyak kepentingan. Tapi coba pikirkan baik-baik pernah tidak dalam sejarah tanah abang blok tanah abang dibagikan secara gratis” (Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

Jika penulis menghubungkan dengan artikel Smudde & Courtright (2011) *A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation*, dalam penelitiannya melakukan analisis menggunakan *pentad* terkait masalah sehari-hari dalam mengelolapara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dilakukan bagi seorang praktisi *Public Relation*. Dengan menggunakan analisis *pentad*, maka akan membantu praktisi *Public Relation* untuk melakukan analisis dan perencanaan, identifikasi, penciptaan, peningkatan hubungan dengan *stakeholder*. Di tingkat ini *hexad* mengungkap dimensi mikropis penting bagi *stakeholder*. Pada akhirnya kombinasi analisis teori dan kasus disintesis menjadi pendekatan prospektif terhadap manajemen pemangku kepentingan yang mungkin digunakan organisasi selama perencanaan strategis.

Smudde & Courtright mengisahkan *The Black Dog Tavern* di Martha's Vineyard merupakan perusahaan terbesar di pulau tersebut dan memiliki hubungan positif dengan pemangku kepentingan karyawan dan masyarakat sebelum tahun 2001. Namun seiring perganti kepemimpinan digantikan putra pendiri perusahaan tersebut. CEO baru tersebut melakukan berbagai kebijakan strategis baru yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Ia memotong separuh tenaga kerja, menghapuskan putaran pembayaran sepanjang tahun dan menutup kedai minum selama 3 bulan pada musim dingin berikutnya. Hasilnya mengakibatkan kemarahan masyarakat, beberapa orang berpikir sumber masalah berasal dari perubahan (*gulit*) yang dijadikan *scapegoat*. CEO baru tersebut menerima kesalahan tersebut namun membenarkannya dengan argumen transenden bahwa kesehatan keuangan perusahaan lebih penting (*redemption*). Meskipun kepercayaan kepuasan lokal telah dilanggar, *The Black Dog Tavern* tetap menjadi penting bagi *stakeholders* (terutama turis dan pelanggan online yang menginginkan koleksi terbaru dan logo *The Black Dog Tavern*).

Implikasi artikel Smudde & Courtright dengan penelitian ini memiliki banyak segi kesamaan. Namun penulis berfokus pada retorika seorang aktor politik. Pada scene ini PKL

Tanah Abang sebelumnya tidak pernah terusik pada pemerintahan Fauzi Wibowo-Prijanto, namun pada saat masa pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama memberikan dampak pada pembenahan birokrasi dan perubahan iklim komunikasi Pemprov DKI terkait eksekusi penertiban PKL Pasar Tanah Abang. Perubahan pada pemerintahan Ahok dianggap tidak mengedepankan dialog dengan tokoh masyarakat dan mengkritik gaya komunikasi Ahok yang dinilai *low context* untuk masyarakat di Jakarta. Mayoritas masyarakatnya Jawa dan Betawi, seringkali ucapan Ahok menjadi persoalan. Sementara masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat Asia umumnya, berbudaya konteks tinggi (Mulyana, dikutip dari Edward T.Hall 1966,1976).Hal tersebut dibuktikan ketika para pengunjung rasa RAJJAM AHOK (Rakyat Jakarta Jahit Mulut Ahok) yang berasal dari paguyuban Betawi Bersatu mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, memperkarakan bicara Ahok yang selama ini keras, khususnya tudingan tentang oknum DPRD dan preman-preman yang mem-backing PKL Pasar Tanah Abang.

Scene di atas memperlihatkan bahwa Ahok yang dijadikan *scapegoat* untuk menebus perubahan pada iklim komunikasi Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, Ahok adalah aktor utama yang diposisikan sebagai akar dari permasalahan sehingga ia dipersalahkan, dan dihujat para pengunjung rasa tersebut. Menurut Suparno (2012,h.197) pengorbanan merupakan gambaran bagaimana seseorang melakukan perlawanan melalui sinisme terhadap kondisi yang dihadapinya. Sedangkan Ahok menyakini Pemprov DKI sudah melakukan sosialisasi sebelum eksekusi kebijakan relokasi penertiban PKL Pasar Tanah Abang. Sama halnya dengan salah satu asumsi teori dramatisme Kenneth Burke bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Ahok mengetahui persis bahwa kentalnya praktik premanisme dengan aksi sewa lapak yang mahal di Tanah Abang dan keinginan para PKL berjualan dipinggir jalan merugikan rakyat menengah kebawah dan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum (*scapegoat*). Untuk itu sebagian masyarakat juga memaknai bahwa tindakan

Ahok memberikan rasa keadilan dengan mengembalikan fasilitas umum pada fungsinya melalui penegakan Perda Ketertiban Umum sudah tugasnya sebagai eksekutor kebijakan. Ahok juga menyiratkan dengan kata-kata bahwa tindakannya tersebut didukung oleh masyarakat khususnya Jokowi, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu.

“Kami lagi bangun pasar, retribusi harian, tidak disewakan, tapi anda tidka boleh curang, cucu anda tidak boleh dapat warisan kalau tidak Jakarta ini dikuasai orang kaya semua. Saya mengerti sekali semua PKL itu pengen di pinggir jalan.” Kata Ahok dengan tenang

(Pemprov DKI Jakarta, 30 Juli 2013)

“Beliau (Jokowi) instruksikan pada saya penyebab macet adalah PKL ini. Semua sudah tahu kan, tinggal eksekusi. Nah, itu apa persoalannya? Tinggal kamu punya nyali nggak? Karena kamu akan menyenggol oknum pedagang sama oknum Konglomerat, ya”

(Detik.com, Agustus 2013)

Melalui penemuan ini, penulis menyimpulkan bahwa adanya kekonsistenan pada tindakan komunikasi politik Ahok melakukan penebusan menggunakan *scapegoat* :

5.1.1 Hasil Temuan *Scapegoat*

NO	Tatanan kelola pemerintahan DKI Jakarta	Lembaga Negara	Media
1	Pada <i>scene</i> Ahok bersitengang dengan Badan Pengawas Keuangan DKI Jakarta (BPK) terkait kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, pada <i>scene</i> tersebut Ahok mengkritik (<i>purpose</i>) agar BPK memperbaiki kinerja, kecermatan, objektif dalam evaluasi proses audit anggaran serta independen tanpa mudah ditunggangi oleh kepentingan politis karena menurutnya banyak oknum-oknum yang	Pada saat Ahok menjabat menjadi anggota DPR RI Komisi II, Ahok aktif memberikan kritik dan argumen kontroversial tentang mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kritik Ahok ditujukan kepada Bawaslu dan KPU untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan terobosan upaya menghindarai	Pada <i>scene</i> Ahok melontarkan pernyataan bahwa berita yang ditayangkan TV ONE menyatakan banyak sekali fitnah dan pemberitaan yang dianggap tidak logis kontennya tidak <i>fair</i> dan menggiring opini untuk menjatuhkan citra Pemprov DKI.

	berlindung dibawah naungan pemerintah.	kecurangan dalam pemungutan suara, dan menciptakan iklim perpolitikan yang kondusif di mana individu-individu yang idealis dan bersih, transparan dan profesional serta mampu bersaing secara sehat	
2.	Pada <i>scene</i> sengketa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Ahok menegaskan praktek gelap memainkan anggaran masi terus terjadi. Ahok mengkritik keras anggota DPRD yang tidak suportif dalam upaya mewujudkan Bersih, Transparan, dan Profesional dalam roda pemerintahan Indonesia khususnya melalui pengelolaan anggaran daerah yang dilakukan menggunakan sistem <i>e-budgeting</i> .		
3	Pada <i>scene</i> Ahok mengkritik Komnas HAM dan warga yang menghambat relokasi Kalijodo, pada <i>scene</i> tersebut Ahok memberikan penekanan (<i>purpose</i>) agar Komnas HAM melakukan langkah yang harmonis dan sinergis dengan Pemprov DKI dalam menegakkan Perda untuk mengembalikan hak-hak negara sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) atas tanah ilegal yang dibuat warga menjadi pemukiman dan kawasan prostitusi yang sudah mengakar di		

	lapisan masyarakat		
--	--------------------	--	--